



VOLUME XIII / NO. 125 / FEBRUARI 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



PADAT KARYA SEJAHTERAKAN DESA

Penyaluran Dana Desa semakin dioptimalkan memasuki tahun keempat. Skema penyaluran lebih fokus pada skema Cash for Work. Program Dana Desa yang kini mengarah pada swakelola diharapkan membuat desa semakin berdaya.

Daftar Isi



5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 15 Selamat Tinggal Desa Tertinggal
- 18 Infografis
- 20 Padat Karya Membangun Desa
- 23 Gotong Royong dan Padat Karya
- 25 Akselerasi Sumber Daya di Desa

WAWANCARA

- 27 Kabar Terkini Proyek MRT

POTRET KANTOR

- 30 Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK Informasi Keuangan Daerah Sebagai Penentu Kebijakan

FIGUR

- 32 Srikandi dari Bea Cukai

EKONOMI TERKINI

- 36 APBN Diharapkan Menjadi Fine Tuner Ekonomi

KOLOM EKONOM

- 40 Refleksi Perekonomian 2017 Menuju Momentum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 2018

GENERASI EMAS

- 44 Pupuk Ilmu Sekarang, Jadi Menteri Kemudian

OPINI

- 46 Keadilan di Era Keterbukaan Informasi

REGULASI

- 48 Ketentuan Barang Bawaan Diubah, Penumpang Bisa Belanja Lebih Banyak

INSPIRASI

- 50 Dedikasi Memberikan Nutrisi Rohani

RENUNGAN

- 52 Mencintai Tanpa Kompromi

BUKU

- 53 Kisah Persahabatan Kareem dan Sang Pelatih

JALAN-JALAN

- 54 Surga Dunia di Nusa Penida

SELEBRITI

- 56 Dari Kota Apel ke The Big Apple



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Belajar keuangan negara
Kapan saja &
Di mana saja

 **klc.kemenkeu.go.id**
KEMENKEU LEARNING CENTER

Dari Lapangan Banteng

Cash For Work Bagi Pembangunan Desa

Pada 2018, pemerintah akan terus melanjutkan program infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga konsisten untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang berfokus pada masyarakat desa. Jumlah penerima bantuan Pogram Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan menjadi 10 juta keluarga, Dana Desa juga ditingkatkan jumlahnya menjadi Rp60 triliun, dan subsidi lebih tepat sasaran kepada kegiatan-kegiatan unggulan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Sepertiga Dana Desa diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masing-masing desa. Untuk mengakselerasi kegiatan tersebut, telah dilakukan percepatan penyaluran Dana Desa di bulan Januari 2018. Semua ini dilakukan

secara terintegrasi agar menggerakkan perekonomian di pedesaan.

Dengan label “Cash for work”, segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa itu sendiri. Tak lupa, pemerintah juga akan mengintegrasikan seluruh kegiatan bantuan sosial dalam satu platform yang sama, Cash For Work. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk menggerakkan perekonomian di desa.

Sebagai pengelola keuangan negara, tentu saja Kementerian Keuangan harus mengawal proses ini mulai dari penyaluran dana sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. Peran ini sangat penting, agar *value for money* yang disalurkan melalui APBN dapat dijaga akuntabilitasnya. Mengingat sumber daya pemerintahan desa yang masih belum

optimal, diperlukan bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang sederhana namun akuntabel. Disinilah tantangannya. Jangan sampai pelaporan menjadi suatu beban bagi pelaksana pembangunan desa, sehingga membuat pembangunan itu sendiri menjadi terbelengkalai karena disibukkan oleh pembuatan laporan.

Cash For Work harus menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Indonesia sudah terlalu lama dibelenggu oleh kemiskinan, sudah waktunya untuk bangkit untuk menyongsong kehidupan yang lebih cerah. Generasi muda harus sehat, cerdas, dan kuat agar siap menghadapi bonus demografi di 2030.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI**

Presiden Jokowi pada November 2017 telah menetapkan pengelolaan #DanaDesa difokuskan dengan skema Cash for Work. Sistem tersebut lebih dikenal dengan istilah padat karya, dengan demikian hasilnya bisa lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program padat karya bertujuan untuk mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang produktif, memanfaatkan tenaga kerja yang besar sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran. Menurut #temankeu apakah pola pengelolaan tersebut sudah tepat sasaran, mengapa? Jawab di kolom komentar disertai tagar #OpiniAnda #MediaKeuangan

@bonisoehakso
Skema Cash for Work tentunya menjadi tepat sasaran apabila desa memiliki data riil Rumah Tangga Miskin sehingga dengan skema ini, pelibatan warga masyarakat kategori RTM diutamakan terlebih dahulu dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

@cutecuteen
Cash for work sangat baik untuk diterapkan. Namun hrs diperjelas lg program yg akan dibuat, yg mana ini hrs melihat kebutuhan masing-masing desa seperti apa. Dan memprioritaskan penduduk miskin terlebih dahulu. Agar tdk tjd dana berlebihan scr cuma2.

Sebaiknya program yg dilaksanakan bersifat sustainable dan mandiri.. supaya utk kedepannya tidak bergantung pada penggunaan dana desa. Dana desa hny digunakan sbg modal awal sj.

@heripratama3006
dgn Skema Cash for Work sudah tepat sasaran utk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena wajib dikerjakan swakelola menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi





Semangat Bersama

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengikuti jam krida olahraga bersama pegawai di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Rawamangun, Jumat (19/01/2018). Kegiatan olahraga bagi para pegawai Kementerian Keuangan, selain bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, juga memperkuat sinergi antarpegawai. Sambil bergandengan tangan dengan pegawai, Sri Mulyani tampak sumringah.

Foto
Dovan Wida

Tradisi Mekotek di Desa Mungguw



U sai ritual di Pura Desa, semua warga beriringan berjalan kaki mengelilingi seluruh desa dengan membawa tongkat panjang yang telah mereka siapkan. Di beberapa titik, mereka berhenti, dan secara berkelompok menyusun satu persatu tongkat yang mereka bawa hingga menyerupai gunung. Siapapun yang bernyal, bisa menaiki puncak kumpulan kayu tersebut, siap memberi komando atau penyemangat bagi kelompoknya. Tradisi turun-temurun bernama Mekotek di Desa Munggu, Bali, ini adalah sebagai prosesi tolak Bala, melindungi dari serangan penyakit dan memohon keselamatan.

Foto
Iskandar Teguh





15/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Luncurkan Publikasi "APBN KiTa"

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi pejabat Eselon I Kementerian Keuangan meluncurkan sebuah publikasi mengenai pelaksanaan APBN 2017 yang berjudul "APBN KiTa (Kinerja dan Fakta)" di aula Mezzanine, gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan. Dengan adanya publikasi "APBN KiTa" diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan APBN secara kontinu dan menyeluruh. "Dengan demikian masyarakat bisa terus melakukan *tracking* APBN yang disampaikan kepada dewan, kemudian disetujui, dan diundangkan sampai ke pelaksanaan APBN ini", jelas Menkeu pada konferensi pers "APBN KiTa" pada Senin (15/01). Diungkapkan oleh Menkeu bahwa semua ini merupakan hasil kerjasama semua unit Kemenkeu dalam menjaga APBN 2017. Nantinya laporan APBN yang dipublikasikan melalui APBN KiTa akan menjadi *update* bulanan agar masyarakat ikut mengawal posisi pelaksanaan APBN di tahun 2018. Sebagai informasi dokumen APBN KiTa dapat diunduh pada tautan www.kemenkeu.go.id/APBNkita. Menkeu mendedikasikan buku "APBN KiTa" edisi Januari ini sebagai laporan kepada publik mengenai penyelenggaraan APBN 2017.

Dalam publikasi ini masyarakat dapat mengetahui informasi mulai dari konteks makro ekonomi yang menjadi asumsi dasar hingga pelaksanaan APBN dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. "Di dalam APBN KiTa ini kita juga menyampaikan *output* belanja pemerintahan sehingga masyarakat bisa mendapat gambaran yang cukup detail dan akurat mengenai gambaran APBN dan capaian *output* yang telah dicapai untuk tahun 2017", tambahnya. Menkeu mendaftar capaian penting berdasarkan realisasi per 12 Januari 2018, yaitu pendapatan naik dari Rp1.655,8 triliun menjadi Rp1.666,3 triliun, belanja negara turun dari Rp2.001,6 triliun ke Rp1.998,5 triliun, pembiayaan 360,8 triliun, defisit turun ke 2.46 persen, dan keseimbangan primer turun ke Rp115,5 triliun. "Ini menggambarkan bahwa pesan yang kami sampaikan sebelumnya, APBN 2017 telah bisa kita dikelola dan realisasinya sangat positif dan menggembirakan dan tetap mendukung momentum pertumbuhan ekonomi," tutup Menkeu.



28/12

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Raih Penghargaan Pengembangan Manajemen Talenta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menerima penghargaan yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada kategori penghargaan bagi pejabat pimpinan tinggi teladan nasional dan penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk kategori instansi pemerintah yang inovatif dalam penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Kemenkeu memperoleh penghargaan 'Pengembangan Manajemen Talenta' pada kategori 'Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara'. Penghargaan dimaksud diterima langsung oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo yang hadir mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di kantor Lembaga Administrasi Negara RI (LAN), Jakarta Pusat, Kamis (28/12).



30/12

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Video Conference Menkeu dengan Pejabat Eselon I dan II Kemenkeu Pusat dan Daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan *video conference* dengan pejabat eselon I dan II Kemenkeu di seluruh Indonesia baik di kantor pusat maupun instansi vertikal pada Sabtu sore (30/12). "Penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kanwil pajak, bea cukai, perbendaharaan, dan kekayaan negara yg ada di seluruh wilayah RI. Semoga dedikasi yg mengagumkan dan prestasi dapat membuat Indonesia yg lebih baik, adil dan makmur," Ucapnya di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kemenkeu. Setelah mendengar laporan dari perwakilan kantor instansi vertikal yang dibagi menjadi 6 regional yaitu Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, serta Sumatera, Menkeu meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus meningkatkan kinerja.

02/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Konferensi Pers Capaian Kinerja APBN 2017

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan capaian kinerja APBN 2017 pada Konferensi Pers di aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kemenkeu, Selasa (02/01). Secara umum perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%, inflasi terkendali pada level rendah 3% dan nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran Rp13.384/USD. "Secara ringkasan, kita bisa sampaikan perekonomian Indonesia di 2017 diperkirakan masih akan tumbuh dikisaran 5,05% terutama disumbangkan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor. Bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas harga, perbaikan tata niaga komoditas pangan dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor riil juga telah menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi terkendali. Ini juga yang menjaga daya beli masyarakat," ungkap Menkeu.



04/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biiro KLI



Menkeu Mempromosikan Pembiayaan UMI di Malang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempromosikan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diperuntukkan bagi usaha mikro yang belum bisa difasilitasi oleh perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kali ini Menkeu menyaksikan penyerahan UMi di kota Malang pada Kamis, (04/01) pada acara Dialog Menteri Keuangan dengan Nasabah Pembiayaan UMi Kota Malang di halaman depan Pasar Besar Kota Malang. Dengan maksimal pembiayaan Rp 10 juta per nasabah, diharapkan UMi dapat memajukan lebih dari 44 juta usaha atau sekitar 7,21% dari usaha jumlah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara nasional. "Bagaimana kita bisa menyalurkan dana kepada para pelaku usaha, ke pengusaha kecil. Semoga seluruh usaha-usaha ultra mikro ini tetap bisa berjalan dengan baik dan ekonomi masyarakat betul-betul bisa terbantu oleh upaya ini," harapnya.

Penandatanganan Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia tetap transparan dan mengacu pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini disampaikan dalam penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum) tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia pada Jumat, (12/01) di aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. “Keseluruhan proses divestasi saham dari PT Freeport Indonesia dimana 51% kepemilikannya akan menjadi kepemilikan pihak Indonesia adalah sesuai dengan komitmen Bapak Presiden Joko Widodo yang harus kita lakukan secara transparan, bersih dari segala konflik kepentingan dan terjaga tata kelolanya pada setiap tahapan. Ini akan menimbulkan *confident* di dalam negeri maupun secara global,” tegas Menkeu.

12/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biiro KLI



16/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Menjadi Pembicara dalam Acara Dialog Menkeu dengan Nasabah UMI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara pada Rabu (17/01). Dalam kunjungannya, Menkeu meninjau proyek pembangunan infrastruktur bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. "Hari ini kita bertiga bersama-sama melihat berbagai lokasi. Pertama elevated kereta api dari Medan ke Kualanamu. Diteruskan Kuala Tanjung melihat seluruh kompleks Pelindo setelahnya Inalum dan jalan kargo kereta api. Kemudian ke tol di Tanjung Morawa dan sekarang disini melihat pelabuhan Belawan," jelas Menkeu kepada awak media di proyek pelabuhan Belawan.



17/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Tiga Menteri Tinjau Proyek Infrastruktur di Medan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara pada Rabu (17/01). Dalam kunjungannya, Menkeu meninjau proyek pembangunan infrastruktur bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. "Hari ini kita bertiga bersama-sama melihat berbagai lokasi. Pertama elevated kereta api dari Medan ke Kualanamu. Diteruskan Kuala Tanjung melihat seluruh kompleks Pelindo setelahnya Inalum dan jalan kargo kereta api. Kemudian ke tol di Tanjung Morawa dan sekarang disini melihat pelabuhan Belawan," jelas Menkeu kepada awak media di proyek pelabuhan Belawan.

22/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Mengadakan Executive Gathering 2018

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan acara Executive Gathering 2018 KolaborAksi: Kolaborasi Untuk Satu Aksi di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/01). Pada acara ini, Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan arahan kepada para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenkeu. Menkeu menekankan pentingnya acara ini adalah untuk mendorong terjadinya interaksi antarpejabat di Kemenkeu. Diharapkan akan mendorong terjadinya sinergi antarunit di Kemenkeu karena pada dasarnya setiap pekerjaan di Kemenkeu saling berhubungan. “Apa yang dilakukan oleh salah satu eselon II itu matters a lot for others. Artinya kita kerja di manapun kita berada harusnya saling isi. Kita semua bekerja itu saling berhubungan,” dorong Menkeu.



SELAMAT TINGGAL DESA TERTINGGAL

Presiden Jokowi menunjukkan komitmen ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’ melalui kebijakan *Cash for Work* atau padat karya tunai. Keputusan ini disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada Jumat (3/11/2017). Padat karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian Dana Desa. Dalam arahan Presiden, skema yang mulai diterapkan pada Januari 2018 ini diarahkan secara swakelola. Swakelola dalam artian warga desa akan terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa proyek desa dan mendapatkan upah.

Padat karya tunai merupakan perbaikan pola penyaluran Dana Desa dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti telah diketahui, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan Dana Desa sejak tahun 2015. Pada tahun 2015, Kementerian Keuangan telah menganggarkan Rp20,67 triliun untuk Dana Desa. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp46,98 triliun, sedangkan pada tahun 2017 meningkat secara signifikan sebesar Rp60 triliun.

“Dengan dana yang telah digelontorkan sejak tahun 2015, jumlah orang miskin di pedesaan telah turun sebanyak 1,58 juta jiwa dalam tiga tahun terakhir. Angka ini masih kurang optimal,” jelas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, mengenai salah satu latar belakang skema padat karya tunai.

Sejak tahun 2015, Dana Desa telah banyak berkontribusi membangun puluhan ribu desa. Terhitung hingga realisasi tahap I tahun 2017, pemerintah telah berhasil membangun 121.709 km jalan desa, 1.960 km jembatan, 41.739 saluran irigasi,



Padat Karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian Dana Desa

Foto Resha Aditya Pratama.



Desa
Panglipuran,
Bali.

Foto
Arfindo
Briyan.

13.973 unit posyandu, 21.357 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 82.356 unit MCK, dan sebagainya. Boediarso menambahkan, dengan pertumbuhan di desa yang signifikan, kemiskinan pun perlahan menurun, namun di sisi lain terdapat pelemahan daya beli masyarakat.

Dengan mempertimbangkan Dana Desa sebagai instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah optimis terhadap hasil skema padat karya tunai ini. Maka, demi mengakselerasi kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah telah berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan ini pada akhir tahun 2017 agar segera diterapkan pada Januari 2018.

Lebih lanjut, Boediarso menjelaskan pengertian skema padat karya tunai atau *cash for work* adalah pola pelaksanaan Dana Desa yang berbentuk padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan.

Padat karya tunai ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 128

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Anggaran Cash For Work

Pada dasarnya, anggaran untuk skema padat karya tunai merupakan bagian dari anggaran Dana Desa. “Tahun 2018 kita tetapkan 30 persen dari Dana Desa harus dipakai untuk biaya gaji pekerja yang bekerja di proyek Dana Desa secara swakelola,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat ditemui Media Keuangan pada November lalu.

Sesuai dengan PMK 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran Dana Desa tahun 2018 terbagi menjadi tiga tahap. Tahap I sebesar 20 persen disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni. Syarat tahap I yaitu Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.

Sedangkan tahap II sebesar 40 persen akan disalurkan paling cepat

bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni. Syarat tahap II yaitu Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran tahap III juga sebesar 40 persen yang akan disalurkan paling cepat bulan Juli. Persyaratan tahap III yaitu Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai tahap II dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai tahap II.

Demi lancarnya pelaksanaan skema padat karya tunai, pemerintah juga telah berkoordinasi menyusun payung hukum berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Desa dan PDTT, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Prioritas Padat Karya

Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan prioritas Dana Desa kepada dua hal, yaitu pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan

masyarakat. Terkait komposisi persentase untuk pemberdayaan dan sarana prasarana ini pada dasarnya sangat tergantung pada kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.

Kementerian Desa dan PDTT sendiri telah menyusun program prioritas pembangunan desa, yaitu Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), embung desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Dalam pelaksanaan padat karya tunai, tiap desa hanya dibatasi dua hingga lima proyek pembangunan. Hal ini bertujuan agar skema padat karya tunai berdampak signifikan.

Begitu juga dengan bahan baku atau material yang digunakan untuk pembangunan, harus menggunakan bahan baku lokal atau desa setempat. Dalam memilih pekerja proyek pun harus ada prioritas, yaitu menggunakan tenaga kerja setempat di luar masa panen, diutamakan pengangguran atau setengah penganggur, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan penduduk miskin.

Tak main-main, Presiden Jokowi telah merencanakan akan meninjau langsung pelaksanaan tahap awal skema padat karya ini. Sepuluh kabupaten telah dipilih sebagai rencana daerah percontohan, yaitu Rokan Ulu, Lampung Selatan, Cianjur, Brebes, Pemalang, Lombok Tengah, Ketapang, Gorontalo, Maluku Tengah, dan Lanny Jaya di Papua. Pada Senin (22/1) lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi langsung pelaksanaan proyek padat karya di Lampung Selatan berupa pengerjaan irigasi sungai.

Efek besar padat karya

Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan kepada Media Keuangan melalui sambungan telepon seluler, “Kebijakan padat karya tunai ini nantinya tidak hanya langsung terukur dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas nasional.” Enny sepakat dengan langkah yang diambil pemerintah karena kebijakan ini dianggap tepat untuk meningkatkan daya saing Indonesia dari sektor

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Di tengah keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi, kita bisa bertarung di pasar global dari hasil UMKM. Padat karya ini tidak membutuhkan teknologi canggih atau modal besar untuk memberdayakan sumber daya manusia,” tambahnya. Agar dalam program pemberdayaan dalam kebijakan padat karya ini mampu berjalan secara berkesinambungan, Enny memberikan beberapa saran.

Perangkat desa sebaiknya bisa menciptakan dan memberikan nilai tambah pada potensi unggulan di setiap desa. Misalnya pada suatu desa produsen singkong, ketela, atau jagung, maka desa tersebut bisa diberi anggaran untuk industri kecil pengolahan bahan baku tersebut menjadi tepung tapioka. Dengan bantuan penciptaan industri yang berkesinambungan, maka masyarakat desa akan menjadi mandiri tanpa terus menerus disokong dana pemerintah.

Lebih lanjut, Enny berharap agar pemerintah terus melanjutkan program-program yang berorientasi pada *outcome* (hasil akhir) dan dampak dari pembangunan. “Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus memiliki dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Padat karya dukung bonus demografi

Dalam kesempatan lain, Telisa Aulia Falianty, Ekonom Universitas

Indonesia juga turut menyambut baik kebijakan ini demi membangun Indonesia dari pinggiran. Menurut Telisa, ada tiga alasan mendasar mengapa kebijakan padat karya tunai ini diperlukan bagi perekonomian Indonesia. Pertama, ketersediaan lapangan kerja sangat mendukung bonus demografi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan bantuan peningkatan *Total Factor Productivity* (TFP) yang juga dapat digenjut dengan program padat karya. Ketiga, perkembangan *digital economy* di satu sisi memberikan peluang namun di sisi lain meningkatkan tantangan karena banyak peran manusia yang tergantikan oleh teknologi.

“Saya juga sangat mendukung pembangunan embung yang menjadi prioritas pembangunan desa oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa dan PDTT. Embung berguna untuk pengairan dan perikanan yang akan membawa dampak ekonomi bagi desa. Untuk mengelola usaha di desa, masyarakat bisa dilibatkan untuk memberdayakan koperasi yang akan lebih produktif mendukung program *cash for work*,” paparnya. Dengan upaya ini, diharapkan semakin banyak daerah pedesaan yang menjadi pusat-pusat perekonomian baru. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada desa tertinggal!

Teks Pradany Hayyu

DANA DESA DENGAN SKEMA CASH FOR WORK

Pada November 2017, Presiden Jokowi memutuskan untuk memfokuskan Dana Desa ke sektor padat karya (cash for work). Tujuannya adalah untuk meningkatkan, memberikan penghasilan pada pekerja (masyarakat) sehingga dapat meningkatkan daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Skema padat karya dapat menyerap banyak tenaga kerja yang juga diberi upah secara harian.

LANDASAN HUKUM

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional



Nomor: 140-8698 Tahun 2017
Nomor: 954/KMK.07/2017
Nomor: 116 Tahun 2017
Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

SASARAN

- Penganggur
- Setengah Penganggur
- Penduduk Miskin
- Penerima PKH
- Stunting

KRITERIA PELAKSANAAN

- Maksimal 5 kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa.
- Memperhatikan besaran upah, seperti besaran upah yang setara dengan upah buruh tani, upah yang dibayarkan minimal 30% dari pekerjaan fisik, dan upah yang dibayarkan secara harian atau mingguan.
- Melihat cakupan kegiatan yang diperluas, mulai dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, sampai pemeliharaan.
- Dilakukan tidak bersamaan dengan masa panen.
- Keberlanjutan program selama setahun.
- Mengoptimalkan peran pendamping desa.

KEGIATAN PRIORITAS



Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, seperti jalan desa, jembatan, tambatan perahu, embung, sumur, drainase & sanitasi, MCK, air minum, lingkungan hidup, posyandu, polindes, pasar desa.



Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, seperti pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.



Kegiatan produksi lainnya, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengelolaan hasil produksi pertanian, dan pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.



Pemberdayaan Masyarakat, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak.



Kegiatan lainnya selain penyelesaian fisik pembangunan.

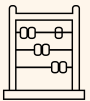
Program padat karya diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak yang positif, seperti:



Menyerap tenaga kerja antara 9,04 juta jiwa – 11,8 juta jiwa



Meningkatkan pendapatan masyarakat antara Rp13,12 triliun – Rp17,5 triliun;



Meningkatkan daya beli masyarakat antara Rp9,1 triliun – Rp12,2 triliun;



Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,09% – 0,12%; dan



Menurunkan kemiskinan hingga 355 ribu jiwa.



PADAT KARYA MEMBANGUN DESA

Pasca kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri meninjau salah satu pembangunan irigasi di daerah persawahan Kabupaten Tegal. Kali ini, Presiden ingin melihat secara langsung dimulainya pelaksanaan program padat karya tunai yang telah dipersiapkan sejak tahun 2017. Program ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan peningkatan daya belinya, namun juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Saat diwawancarai Media Keuangan beberapa waktu lalu, Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, menjelaskan terkait program padat karya tunai. Dalam program tersebut, masyarakat bisa bekerja dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Dana Desa yang telah ada. Selain itu, program padat karya tunai akan terintegrasi juga dengan program kementerian

teknis lainnya yang memiliki kegiatan di perdesaan. Tujuannya adalah agar masyarakat di desa bisa memperoleh pekerjaan dan mendapat upah secara harian atau mingguan.

“Kita fokus dengan program yang ada. Bukan dari Dana Desa dialihkan (semuanya) ke *cash for work*. Tetap terintegrasi dalam program yang lain, tetapi nantinya yang diperlukan adalah perubahan pengelolaannya. Yang sebelumnya diserahkan ke swasta, sekarang diserahkan ke masyarakat untuk mempekerjakan orang-orang di kampung,” jelasnya.

SKB 4 Menteri

Untuk mendukung pelaksanaan program padat karya tunai tersebut, pemerintah 4 Kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Dalam SKB Mendagri, Menkeu, Mendes-PDTT, dan Kepala

Bappenas Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017, pemerintah ingin melakukan penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

SKB yang ditandatangani pada bulan Desember 2017 tersebut diantaranya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program padat karya tunai. Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (BPD) Kemendagri, Nata Irawan, SKB tersebut memiliki peran strategis dalam percepatan pelaksanaan pembangunan dan memberikan nilai tambah atas kepedulian desa dan masyarakatnya. Hal tersebut terutama dalam mengurangi jumlah tenaga kerja menganggur, setengah menganggur dan masyarakat miskin di desa. Selain itu, program tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan UU Desa. Salah satu instrumen pentingnya adalah pengalokasian APBN sebesar sepuluh persen dari dan di luar transfer ke daerah kepada desa atau disebut Dana Desa. Dengan adanya transfer dana dari APBN tersebut, desa saat ini mempunyai kepastian pendanaan dalam membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurutnya, setiap desa saat ini menerima Dana Desa dengan jumlah rata-rata di atas tujuh ratus jutaan. Jumlah tersebut apabila

ditambah dari sumber lain, seperti Pandapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak, retribusi daerah, serta bantuan keuangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, maka jumlahnya dapat mencapai lebih dari 1 Miliar (Rupiah). “Dengan mendapatkan dana tersebut, desa diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur dan fasilitas produksi (ekonomi) yang ada di desa untuk menggerakkan roda perekonomian di wilayahnya, seperti perbaikan jalan desa, pembangunan embung, saluran irigasi, dan sarana produksi lain yang ada di desa,” jelas Nata.

Percepatan Dana Desa untuk padat karya

Untuk mendukung pelaksanaan SKB 4 Menteri tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Boediarso Teguh Widodo, di dalam PMK revisi tersebut diatur bahwa penyaluran Dana Desa saat ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama merupakan perubahan skema pencairan yang sebelumnya dilakukan dua tahap, yakni 60 persen pada bulan Maret dan 40 persen pada bulan Agustus. Untuk tahun 2018, pada dasarnya akan tetap terdiri dua tahap. Namun, pada tahap pertama dibagi menjadi dua periode, yakni 20 persen pada bulan Januari dan 40 persen di bulan Maret. Tujuannya adalah melaksanakan arahan amanat Presiden agar program *cash for work* dapat segera dimulai sejak Januari.

“Tujuan *cash for work* itu adalah (menyerap) banyak tenaga kerja, yang bekerja diberikan upah, upahnya dibayar harian atau mingguan. Karena itu, kalau dimulai bulan Januari harus tersedia likuiditasnya, *petty cash* di masing-masing kas desa. Karena itu kalau menunggu bulan Maret, itu kan lama. Karena dia harus bayar harian tadi, maka harus tersedia uang kas di desa,” jelasnya.

Dengan begitu, kesinambungan dari kas desa akan dapat terjaga dalam melaksanakan program padat karya tunai. Lebih jauh, Boediarso mengungkapkan bahwa penyaluran dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dapat dilakukan dengan dua persyaratan. Pertama adalah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD oleh pemerintah daerah. Perda tersebut penting karena akan menjadi dokumen dasar untuk otorisasi anggaran yang di dalamnya mengatur mengenai dana desa.

“Yang kedua adalah Peraturan Bupati atau Walikota tentang tata cara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa per desa,” tambahnya. Apabila dua peraturan tersebut sudah terbit, Dana Desa untuk skema padat karya tunai dapat disalurkan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa. Untuk penyaluran ke kas desa, pemerintah Kota/Kabupaten diberikan waktu tujuh hari semenjak Dana Desa masuk ke dalam RKUD.

Yang ketiga, agar desa dapat melakukan pencairan, desa diwajibkan membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). “Untuk bisa menerima pencairan dana desa tahap I yang 20 persen, desa itu harus menerbitkan Perdes tentang APBDes karena

Pembangunan irigasi di daerah persawahan Kabupaten Blora.

Foto
Anas Nur
Huda

"Kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, seperti mengemudi-kan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja juga bisa."

Ubaidi Socheh Hamidi
Direktur Pembiayaan dan Transfer Dana Non Dana Perimbangan

sebagai dokumen otorisasi anggaran di desa,” jelasnya lebih jauh.

Skema program padat karya tunai
Direktur Pembiayaan dan Transfer Dana Non Dana Perimbangan DJPK Kemenkeu, Ubaidi Socheh Hamidi, memaparkan bahwa program padat karya tunai dalam pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya dilaksanakan dengan beberapa kriteria. Pertama, kegiatan tersebut harus bersifat swakelola. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari luar daerah.
Yang kedua, kegiatan dalam program tersebut harus menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Terakhir, kegiatan dalam program tersebut menggunakan bahan baku atau material setempat agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif di desa. Tujuannya agar dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku.

“Dengan prinsip tersebut, maka Dana Desa tidak akan mengalir keluar desa tetapi hanya berputar di desa itu sendiri, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat,” jelas Ubaidi.

Di samping itu, menurutnya, dalam melaksanakan program padat karya tunai perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan yang menggunakan Dana Desa dialokasikan maksimal dalam

lima kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Hal tersebut perlu dilakukan agar Dana Desa dapat lebih terarah dan memberikan upah yang lebih besar kepada para pekerjanya. Untuk besaran upah sendiri, ia menjelaskan bahwa minimal 30 persen dari nilai pekerjaan fisik digunakan untuk membayar upah pekerja. Selain itu, upah pekerja harus dibayarkan secara harian atau mingguan.

Lebih jauh, Ubaidi menambahkan agar program Dana Desa diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak memerlukan alat berat/alat besar. Dari segi cakupan kegiatan juga diperluas, yakni mulai dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, maupun pemeliharaan. Agar memiliki dampak positif, proses pengerjaannya tidak dilaksanakan bersamaan dengan masa panen, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat ketika dalam masa transisi panen. Yang terakhir adalah perlunya memperhatikan keberlanjutan penyediaan lapangan kerja selama setahun, serta melakukan optimalisasi peran dari pendamping desa.

Fokus bidang pembangunan
Di sisi lain, program padat karya tunai akan difokuskan pada beberapa bidang pembangunan di desa. Menurut Ubaidi, padat karya tunai akan difokuskan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan dari desa, seperti perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa, serta pembangunan tambatan perahu. Sementara itu, Dana Desa padat karya tunai

juga dapat difokuskan untuk pemanfaatan lahan dalam rangka meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, kegiatan produktif lainnya, serta untuk pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, seperti mengemudi-kan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja juga bisa,” jelasnya kepada Media Keuangan.

Sepakat dengan hal tersebut, Dirjen BPD Kemendagri, Nata, menambahkan bahwa pelaksanaan program padat karya tunai tahun 2018 akan diprioritaskan kepada 1.000 desa di 100 kabupaten pada 9 Provinsi yang diusulkan oleh Bappenas bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Lebih jauh, ia menjelaskan, program padat karya tunai di desa tidak hanya diperuntukkan hanya pada kegiatan pembangunan infrastruktur saja, namun juga kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi serta Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selanjutnya, karena program padat karya tunai bersumber dari Dana Desa, maka peruntukkannya berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang terdiri dua bidang, yaitu bidang pembangunan fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Teks Abdul Aziz



GOTONG ROYONG DAN PADAT KARYA

Desa Munduk Temu merupakan salah satu desa perbukitan yang terletak di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kehidupan sosial masyarakat di desa ini masih sangat kental dengan budaya gotong royong. Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga dalam membangun desanya.

Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Bentuk solidaritas sosial ini pula yang menyukseskan program Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Munduk Temu. Artinya, saat ini air bersih sudah bisa diakses oleh seratus persen warga.
Pebekel Desa Munduk Temu I Nyoman Wintara menceritakan, wilayah Munduk Temu yang berada di dataran tinggi menyebabkan desa ini kesulitan air bersih. Sebelum program Pamsimas dimulai, kebanyakan penduduk harus mengandalkan tadah hujan atau mengambil air di sungai jauh di bawah bukit. Setelah program Pamsimas dijalankan, sanitasi di desa berangsur membaik. Munduk Temu kini bebas

Jalan desa mempermudah pengangkutan hasil kebun.

Foto
Venggi Ovisa

dari budaya buang air besar sembarangan. Pada 2017 seluruh penduduk sudah menerapkan jamban sehat dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun.

Keberhasilan Munduk Temu ini kemudian membawa Kabupaten Tabanan meraih Penghargaan Pamsimas Award 2017 dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tak hanya itu, Kabupaten Tabanan juga meraih Dana Rakca Award 2017 terkait pengelolaan dana desa.

Pamsimas di Desa Munduk Temu berjalan sejak 2014. Dengan modal anggaran sekitar Rp245 juta, akses air bersih mampu menjangkau sekitar 65 persen penduduk dari sebelumnya hanya 40 persen saja. Dengan dukungan dana desa dan bantuan dana alokasi khusus (DAK) 2017 sekitar Rp1,8 miliar serta sisa DAK 2017 sekitar Rp163 juta, akhirnya sistem air bersih bisa dimiliki oleh seluruh warga.

Jalan Desa

Selain air bersih, jalan desa juga menjadi prioritas utama pembangunan di Munduk Temu. Wintara menjelaskan, Munduk Temu dapat dikatakan terpencil, sebab berada di ujung Kabupaten Tabanan. Wilayahnya berbukit-bukit dengan ketinggian 600–700 meter di atas permukaan laut.

Lebih dari 90 persen warga desa adalah pekebun dengan komoditas utama kopi dan salak. Selain itu penduduk juga menanam areal perkebunannya dengan buah-buahan lain seperti jeruk, manggis, dan durian dengan sistem tumpang sari.

Wintara mengungkapkan, sebelumnya penduduk harus berjalan kaki cukup jauh melewati jalan setapak untuk mengangkut hasil panen. Kontur jalan yang naik turun serta kondisi cuaca yang kerap kali hujan tentu membuat jalan licin serta sulit dilalui. “Dulu mereka susah membawa hasil kebunnya. Jalan desa bisa meringankan. Ada yang bisa dilalui sepeda motor, ada juga yang bisa dilalui mobil,” ungkapny.

Secara keseluruhan Munduk Temu terdiri dari enam Banjar Dinas yang tersebar memanjang sejauh 15 km, sedangkan areal perkebunan berada di tengah-tengah. Sebab itu, jalan desa menjadi vital. Selain membuka akses penduduk, jalan ini juga untuk memudahkan transportasi dari dan menuju kebun.

Sejak tahun 2015–2017 Munduk Temu sudah membangun jalan sepanjang total 9,24 km. Diperkirakan, Munduk Temu masih membutuhkan dua

buah jembatan serta 10 km jalan penghubung antarbanjar dan antarkebun. “Dengan Dana Desa kita bangun setapak demi setapak, supaya pengangkutan hasil kebun lebih lancar,” ujar Wintara.

Program Padat Karya

Disinggung mengenai program padat karya yang akan segera diberlakukan, Wintara berpendapat bahwa konsep ini pada dasarnya bisa membantu, namun perlu memperhatikan kearifan lokal dan kondisi masing-masing desa. Untuk Munduk Temu sendiri, menurutnya program ini kurang cocok sebab semangat gotong royong masyarakat di desanya masih sangat kental.

Wintara mencontohkan, saat membangun jalan desa dan sarana air bersih, semuanya dilakukan dengan swadaya warga sendiri. Tidak ada biaya pembebasan lahan sepeserpun. “Mereka membuat surat pernyataan untuk merelakan tanahnya dijadikan jalan,” kata Wintara.

Diceritakan Wintara lebih lanjut, warga desa juga urun tenaga secara sukarela. Dalam proses pembangunan fisik jalan dan sarana air bersih tidak ada penduduk yang tinggal diam. Mulai dari kaum lelaki hingga ibu-ibu, semua ikut terlibat tanpa mengharap upah. “Warga berpikir *kan* mereka tinggal mengerjakan, tidak mengeluarkan uang. Toh, jalannya untuk mereka gunakan sendiri,” ujar Wiratama.

Menurutnya, meski Munduk Temu bukan daerah kaya, tetapi rata-rata penduduknya masih bisa mencari pekerjaan. “Pola pikir masyarakat bisa berubah.

Misalnya terjadi kecemburuan sosial karena yang diupah hanya yang kerja, sementara yang sudah berkecukupan jadi tidak mau ikut kerja. Meski baik, namun bisa jadi pemberian *cash for work* mengikis kekerabatan,” ujar Wintara.

Wintara berpandangan, program padat karya lebih cocok diterapkan di desa-desa yang benar-benar miskin dan minim lapangan pekerjaan. Misalnya di wilayah Indonesia timur yang masih sering mengalami gagal panen jagung.

Meski begitu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso mengatakan, desa sebetulnya tidak perlu khawatir. Sebab, program *cash for work* hanya diperuntukkan bagi mereka dengan kategori pengangguran, setengah menganggur, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan penduduk miskin. “Anak-anak tidak diperkenankan ikut, tetapi perempuan atau ibu-ibu boleh,” katanya.

Selain itu, program padat karya tidak boleh dilakukan bersamaan dengan masa panen. Saat panen, penduduk tetap harus bekerja di sawah atau kebun. Namun, di luar itu, mereka bisa menerima upah dari proyek yang didanai desa. Dengan begitu, akan ada kesinambungan pendapatan bagi penduduk miskin. “Masyarakat yang lebih mampu tetap bisa menyumbang materi atau tenaga. Tidak perlu ada kekhawatiran karena sifat komunal masyarakat kita sudah luar biasa,” tutup Boediarso.

Teks Irma Kesuma Dewi

AKSELERASI SUMBER DAYA DI DESA

Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengucurkan Dana Desa ke 70.000 lebih desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Meskipun diakui telah memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, besaran Dana Desa yang terus meningkat masih belum optimal dalam mendukung penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Maka, Presiden Jokowi menginstruksikan kebijakan Padat Karya Tunai (*cash for work*) pada awal tahun 2018. Simak seluk beluk kebijakan tersebut bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, berikut ini.

Presiden Jokowi menetapkan program Dana Desa berfokus pada proyek padat karya tunai pada awal tahun 2018. Apa latar belakang kebijakan ini?

Pola pelaksanaan Dana Desa dalam bentuk padat karya (*cash for work*) adalah sebuah pola. Padat karya artinya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Para pekerja akan mendapatkan upah secara harian atau maksimal mingguan.

Nah, kenapa dilakukan dengan skema *cash for work*? Pertama, kita lihat bahwa selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017, dana yang digelontorkan dan disalurkan ke desa itu sudah mencapai Rp287 triliun. Angka kemiskinan di desa turun cukup signifikan dari 17,98 juta jiwa atau 14,09 persen di tahun 2015 menjadi 16,5 juta jiwa di tahun

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo.

Foto
Anas Nur Huda.

2017. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun, angka kemiskinan di pedesaan turun sebesar 1,58 juta jiwa. Angka ini masih kurang optimal dibandingkan dengan dana besar yang dikucurkan pemerintah.

Dana Desa ini merupakan instrument yang cukup strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana di desa. Sudah ratusan ribu kilometer jalan desa dibangun, ratusan ribu meter jembatan desa dibangun, begitu juga dengan Pondok Bersalin Desa (Polindes), embung, BUMdes, dan sebagainya. Di sisi lain, kebijakan ini masih belum membuat daya beli masyarakat desa meningkat. Maka, *cash for work* ini menjadi instrumen kunci dalam mengakselerasi peningkatan daya beli, perluasan kesempatan kerja, hingga akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana alokasi anggaran untuk proyek padat karya tunai?

Pada dasarnya, anggaran untuk proyek padat karya tunai merupakan bagian dari anggaran Dana Desa. Untuk mendukung kebijakan ini, minimal sebesar 30 persen dari nilai pekerjaan fisik yang didanai dari Dana Desa harus diwujudkan dalam bentuk pemberian upah kepada tenaga kerja setempat.

Agar kebijakan ini dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2018, pemerintah telah menetapkan SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Desa dan PDTT, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Bagaimana peran Kementerian Keuangan agar kebijakan proyek padat karya tunai ini berjalan dengan semestinya?

Kementerian Keuangan diberikan mandat untuk melakukan penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Desa menjadi paling cepat bulan Januari 2018 agar pelaksanaan padat karya tunai di desa dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Keuangan melakukan revisi PMK 50/PMK.07/2017 menjadi PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari 2018.

Penyalurannya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I sebesar 20 persen, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan. Tahap II sebesar 40 persen, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan. Tahap III sebesar 40 persen, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan.

Apakah ada kriteria tertentu bagi desa yang akan diterapkan kebijakan proyek padat karya tunai?

Program ini ditujukan untuk seluruh desa, yaitu 74.958 desa, namun memang ada prioritas. Prioritas dilakukan pada 1000 desa di 100 kabupaten/kota. Untuk tahap awal, sudah dipilih 100 desa di 10 kabupaten/kota sebagai *pilot project* pelaksanaan *cash for work*. Kriteria desa-desa tersebut antara lain desa yang memiliki angka *stunting* yang tinggi, kurang gizi, kemiskinan yang masih tinggi, dan termasuk dalam status desa tertinggal atau sangat tertinggal.

Selain melibatkan Kementerian Desa dan PDTT, kebijakan padat karya juga melibatkan kementerian lain. Apakah anggaran juga dialokasikan dari kementerian tersebut?

Beberapa sumber pendanaan proyek padat karya berasal dari Dana Desa, anggaran kementerian/ lembaga, dan anggaran pemerintah daerah. Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa dan memungkinkan untuk tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga atau kontraktor.

Dalam anggaran kementerian/ lembaga, sumber dana berbentuk bantuan pemerintah (swakelola oleh kementerian/ lembaga), tugas pembantuan, dan bantuan sosial. Sedangkan dalam anggaran pemerintah daerah, sumber dana berbentuk bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD kabupaten/kota kepada desa, serta pembiayaan program yang diwakelola oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Bagaimana pendampingan dan pengawasan penggunaan anggaran untuk kebijakan proyek padat karya tunai?

Pengawasan itu bisa dilakukan secara berjenjang. Pengawasan yang paling baik tentu berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa rutin melakukan kunjungan langsung. Selain itu ada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah.

Kementerian Desa dan PDTT juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang diketuai pak Bibit Samad Rianto. Apabila ditemukan praktik penyelewengan Dana Desa, masyarakat sekarang bisa melaporkan ke *call center* Satgas Dana Desa di nomor 1500040. Nah selain itu Menteri Desa dan PDTT juga telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kapolri dan Menteri Dalam Negeri mengenai pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan Dana Desa.

Teks Pradany Hayyu

Kabar Terkini Proyek MRT

Sebentar lagi Jakarta akan punya ikon baru, *Mass Rapid Transit* (MRT) atau Moda Raya Terpadu. Sistem angkutan cepat ini akhirnya terwujud setelah sekian lama ditunggu-tunggu oleh warga ibukota. Tak hanya akan mengurai kemacetan, MRT disiapkan untuk mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih modern. Ditemui di kantornya, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar bercerita kepada Media Keuangan kabar terbaru proyek kebanggaan nasional ini.

Seperti apa perkembangan pembangunan MRT saat ini?

Jadi, saat ini kita masih mengerjakan MRT tahap I, yakni rute Lebak Bulus sampai bundaran HI. Sampai Desember 2017 kemajuannya sudah sekitar 90 persen. Kira-kira bulan April tahun 2018 kereta akan mulai datang. Sebelum Asian Games dimulai, sebagian besar konstruksi akan selesai.

Kemudian integrasi sistem akan mulai dijalankan pada bulan Agustus. Pada Desember 2018 kita akan mulai uji coba pengoperasian kereta tetapi belum

William Sabandar.

Foto Venggi Ovisa



Terowongan MRT.

Foto Langgeng Wahyu

dengan penumpang. Kemudian di bulan Maret 2019 operasi komersial akan kita mulai. Ketepatan waktu pengerjaan ini akan kita jaga.

Bagaimana integrasi MRT dengan moda transportasi lain?

Integrasi harus ada. Sebagai gambaran, saat ini pada tahap I kita tengah membangun jalur sepanjang 1 km. Pada tahap II kita akan membangun jalur sepanjang 8km dari Bundaran HI ke Kampung Bandan. Harapannya tahun 2019 kita juga sudah bisa mengembangkan rute ke arah Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Agar MRT bisa berkembang, kuncinya adalah integrasi dengan moda transportasi publik yang lain. Untuk Tahap I kami berkoordinasi dengan Trans Jakarta yang akan menjadi bus pepadu moda. Jadi, begitu keluar stasiun akan 5 titik yang teritegrasi sempurna dengan halte Trans Jakarta. Mulai dari Lebak Bulus, Blok M, Sisingamangaraja, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

Tentunya, kami juga sedang berpikir untuk integrasi dengan jalur komuter Jabodetabek, menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing stasiun. Begitu juga dengan *rail-link* atau kereta bandara. Nantinya kereta bandara akan tersambung dengan MRT.

Selain itu, kami berencana untuk membangun *park and ride* atau kantung parkir kendaraan. Nanti di Lebak Bulus akan kami siapkan satu. Jadi, penumpang dari selatan Jakarta bisa memarkirkan kendaraannya di situ, tidak harus masuk ke pusat Jakarta. Dari sana mereka bisa naik MRT sekitar 30 menit menuju bundaran HI. Daripada bawa kendaraan sendiri bisa 1 jam hingga 1,5 jam.

Bagaimana dengan jaminan ketepatan waktu?

Sistem pengoperasian MRT adalah otomatis. Jadi tidak lagi mengandalkan masinis. Meski masinis tetap ada, tetapi fungsi masinis lebih utama pada situasi darurat. Seluruh operasional kereta akan dilakukan dari pusat kendali. Dengan begitu, ketepatan waktu bisa dijamin. Kalau kereta berangkat pukul 7 pagi dari Lebak Bulus, maka pada pukul 7.30 sudah pasti harus tiba di Bundaran HI.

Kemudian, pada jam-jam sibuk di pagi hari, interval keberangkatan kereta adalah 5 menit saja. Sedangkan pada jam tidak sibuk intervalnya akan dibuat 10 menit. Nah interval dan ketepatan waktu tersebut akan memberi tingkat kepastian yang tinggi sehingga penumpang tidak perlu rebut-rebutan.

Jadi kalau keretanya sudah penuh, tunggu saja 5 menit. Dalam waktu 5 menit itu sudah pasti ada kereta lagi. Dengan kenyamanan seperti ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih teratur dan turut menjaga transportasi publik.

Selain ketepatan waktu, apalagi fasilitas yang ditawarkan MRT?

Konsep yang kami siapkan adalah pelayanan yang lengkap. Kami sudah menyiapkan area untuk gerai makanan dan minuman, warung kopi, toko ritel, toko serba ada, serta anjungan tunai mandiri. Jadi masyarakat akan merasa nyaman masuk di stasiun MRT dari ujung ke ujung.

Setiap stasiun akan dibuat menarik sehingga masyarakat melihat MRT bukan hanya sebagai sarana transportasi tetapi juga bagian dari gaya hidup. Gaya hidup yang baik tentu akan membuat situasi sepanjang jalur MRT itu nyaman, ramah, inklusif, serta bisa berkomunikasi dengan semua orang.

Disamping pembangunan fisik, apalagi yang perlu disiapkan?

Sebenarnya, PT MRT punya tiga mandat yakni membangun infrastruktur, menyiapkan operasional dan pemeliharaan kereta, serta membangun bisnis di sekitar stasiun. Hal ini untuk menjamin agar MRT juga memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan non tarif. Sebab, tiket pasti disubsidi agar tidak memberatkan pengguna.

Pendapatan non tarif ini diharapkan dapat membantu operasional MRT supaya bisa berkelanjutan. Jika terus tergantung pada subsidi dan penjualan tiket, dalam jangka panjang perusahaan menjadi tidak sehat. Sebab, harusnya subsidi hanya digunakan untuk waktu tertentu sampai perusahaan bisa bergerak sendiri. Oleh karena itu, kami juga harus mengembangkan pusat bisnis baru.

Bagaimana strategi MRT agar titik-titik ekonomi baru tersebut bisa tumbuh?

Titik ekonomi baru akan tumbuh di setiap stasiun karena wilayah ini akan sangat ramai oleh naik turunnya penumpang. Jadi kawasan ini harus kita

kelola. Dalam mengembangkan konsep kawasan transit terpadu di beberapa stasiun, terlebih dahulu kami harus memastikan arus penumpang aman dan teratur.

Hal ini berarti penumpang harus nyaman saat berganti moda dari MRT ke Trans Jakarta, jalur komuter, atau kereta bandara. Untuk itu, kami akan menyiapkan jalur pejalan kaki yang nyaman di kedua sisi MRT. Tidak hanya untuk pejalan kaki tetapi juga untuk pengguna sepeda serta penyandang disabilitas.

Selain itu, kami bermaksud membuat semacam ruang terbuka di mana masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas. Kawasan ini harus bisa diakses semua orang dengan mudah. Jadi ada interaksi yang paling menguntungkan antara pengembang kawasan, properti, dengan pengembangan transportasi.

Penataan kawasan yang baik akan membuat semakin banyak orang yang datang. Dengan sendirinya pengguna MRT akan bertambah, titik ekonomi akan tumbuh, jumlah pekerja semakin banyak, dan pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan pajak.

Dengan kehadiran MRT, sejauh mana budaya bertransportasi akan berubah?

Pergeseran budaya bertransportasi perlu diupayakan bersama. Meski merupakan teknologi transportasi modern, namun MRT tidak bisa bekerja sendiri. MRT harus bekerjasama dengan seluruh penyedia jasa transportasi agar layanan-layanan kita terintegrasi dengan baik.

Masyarakat juga perlu didorong untuk menggunakan transportasi publik. Selain itu, harus ada dukungan penuh dari pemerintah untuk memastikan ada insentif bagi sektor transportasi publik. Seluruh kebijakan pemerintah

menjadi sangat penting. Jika kita sudah berada pada situasi dimana transportasi di Jakarta bukan lagi sesuatu yang tidak menyenangkan, perubahan cara pandang dan budaya bertransportasi akan berubah dengan sendirinya.

Seperti apa tarif yang adil namun tidak merugikan MRT?

Jadi begini. Cara menentukan tarif adalah dengan membagi nilai investasi dengan perkiraan jumlah penumpang. Untuk fase I investasi kita sekitar Rp16 triliun. Diperkirakan jumlah penumpang setiap harinya sekitar 173.400 orang. Berdasarkan angka tersebut tarif komersial tanpa subsidi sekitar Rp20 ribu per orang dari Lebak Bulus ke Bundaran HI.

Saat ini kami tengah melakukan survei kesediaan membayar dari masyarakat. Dengan mengkaji selisih angka tersebut dengan beberapa pandangan lainnya, nantinya akan ditentukan tarif yang sesuai setelah disubsidi. Tiga bulan sebelum MRT beroperasi kami harus sudah mendapatkan angkanya.

Bagaimana cara menjaga keamanan MRT yang berada di bawah tanah?

Prinsip kami *safety is our business*. Jadi, budaya keselamatan dan keamanan pekerjaan itu adalah prioritas kita. Seluruh faktor kemanan sudah dipikirkan dari tahap perencanaan. Kami tidak main-main kalau soal itu. Kualitas pekerjaan selalu nomor satu, termasuk dalam menjaga agar MRT aman dari gempa.

Selain itu, faktor keselamatan kerja juga ditekankan. Target kami adalah nol kecelakaan. Begitu ada ada petugas yang lalai dan membahayakan pekerja lain, ya sudah, akan dikenakan sanksi.

Teks Irma Kesuma

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan
Informasi Keuangan Daerah, DJPK

Informasi Keuangan Daerah Sebagai Penentu Kebijakan

Sejak tahun 2015, pemerintah mulai menerapkan kebijakan Dana Desa demi meningkatkan perekonomian Indonesia hingga ke seluruh pelosok nusantara.

Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran.

Dana besar yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun 70 ribu lebih desa di seluruh Indonesia tentunya harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan yang baik. Pengelolaan Dana Desa tentu berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dalam menguasai pengelolaan keuangan daerah.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membentuk Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah. Unit eselon II ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pasal 1407.

Peran Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPIKD) sangat diperlukan mengingat selama ini terdapat indikasi pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik. Hal ini tentu berdampak pada kualitas belanja dan rendahnya kualitas pelayanan publik sehingga perlu dilakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik dalam rangka pemberian *reward* dan *punishment*.

Direktur EPIKD, Ria Sartika Azahari, menjelaskan pentingnya penyajian informasi keuangan daerah sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat sangat memerlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Secara umum, Direktorat EPIKD bertugas melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan dan perekonomian daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, unit yang berlokasi di Gedung Radius Prawiro lantai 8 Kantor Pusat Kementerian Keuangan ini terbagi ke dalam enam subdirektorat plus jabatan fungsional.

Mengembangkan SIKD

Peran Direktorat EPIKD semakin strategis dengan adanya informasi dan data yang akurat dan komprehensif sebagai penentu kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Fungsi strategis tersebut didukung oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Terkait dengan hal tersebut, beberapa fungsi strategis Direktorat EPIKD antara lain mengelola data APBD dan data perekonomian daerah, khususnya yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan desentralisasi fiskal dan perhitungan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kedua, mengembangkan *Dashboard Executive Information System (EIS)* SIKD guna mempermudah pimpinan memperoleh informasi tentang keuangan daerah secara cepat dan terkini.

Ketiga, mengelola SIKD yang saat ini telah menjadi sumber informasi utama terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, sekaligus berupaya menjadi *One Source Data* Keuangan Daerah di level nasional yang dapat digunakan untuk penyajian informasi keuangan daerah secara lebih luas.

Dengan demikian, Direktorat EPIKD tidak hanya berperan dalam mendukung tugas-tugas di lingkup internal Kementerian

Ria Sartika Azahari bersama jajaran pejabat dan pegawai di Direktorat EPIKD.

Direktur EPIKD Ria Sartika Azahari.

Dirjen Perimbangan Keuangan beserta jajaran Pejabat Eselon II di DJPK.

Foto Dok. Direktorat EPIKD



Keuangan, tetapi juga mendukung pemangku kepentingan lainnya seperti kementerian/lembaga, akademisi, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum lainnya.

SIKD telah berhasil terkoneksi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 542 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Beberapa elemen data yang telah dikirimkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia ke SIKD melalui Agen Sinergi SIKD antara lain data APBD Murni dan Perubahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan, LRA Semester dan LRA Akhir Tahun serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemda juga mengirimkan data terkait Posisi Kas dan Perkiraan Belanja melalui aplikasi Simpatik SIKD. Selain itu, Pemda juga mengirimkan data terkait pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik di daerah melalui aplikasi DAK SIKD. Untuk kebutuhan monitoring pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, SIKD telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada).

Target dan tantangan

Pada tahun 2018, Direktorat EPIKD telah menentukan target dan melakukan evaluasi demi perbaikan kinerja ke depan. Target yang akan dicapai pada tahun ini yakni pengembangan SIKD, melakukan evaluasi dan kajian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di daerah, menyediakan data dasar perhitungan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, melakukan pengumpulan dan verifikasi agar data yang tersedia lebih akurat, serta mendorong percepatan realisasi anggaran di daerah melalui penerapan kebijakan *reward and punishment* sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Setiap tanggung jawab tentu tak lepas dari tantangan. Salah satu kendala yang ditemui yaitu masih terdapat Pemda yang terlambat menyampaikan data APBD dan/atau kurang optimalnya *compliance* daerah dalam menyampaikan data secara akurat, lengkap dan terkini. Dalam mengatasi hal tersebut, Direktorat EPIKD berupaya menyiapkan aturan dan melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan daerah dalam rangka meningkatkan penyampaian data tepat waktu, lengkap, akurat dan terkini.

Direktorat EPIKD akan terus meningkatkan kualitas kinerja demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Begitu pula dengan menjaga hubungan dengan stakeholders, Direktorat EPIKD akan terus berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menyusun kegiatan serta kebijakan.

Teks Pradany Hayyu

Srikandi dari Bea Cukai

Kain-kain kerajinan daerah yang didominasi bermotif batik itu ditunai dengan sangat rapi. Beberapa bahan dengan motif berbeda dikombinasikan sehingga bisa menjadi baju batik dengan corak yang unik dan menarik. Semua itu tak lepas dari bakat dan minat mendesain baju dari sesosok wanita. Di lain waktu, sosok tersebut juga harus bekerja pagi hingga malam untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara. Semenjak kuliah sampai bekerja, ia harus terbiasa menjadi kaum minoritas dalam lingkungan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Di sore yang lain, sosok wanita itupun merasa bahagia menerima anugerah untuk memimpin instansi bea cukai paling tinggi di wilayah Timur yaitu Maluku dan Maluku Utara. Tak segan-segan, pelantikan itu menobatkan dirinya menjadi satu dari dua wanita yang menduduki jabatan eselon 2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, institusi yang bertugas tidak hanya membantu penerimaan negara, namun juga menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan RI.

Ialah Finari Manan, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, DJBC Kemenkeu. Enam bulan menjabat, Finari

sudah merasa menyatu dengan Amboina, Ternate, dan Tual, yang merupakan tiga daerah kantor pelayanan bea cukai di bawah pengawasannya. Ia berkomitmen penuh untuk mendorong peran Bea Cukai Maluku dalam mendorong perekonomian masyarakat setempat, baik melalui sektor perikanan, perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata. “Harapan saya, dimanapun ditempatkan, Bea Cukai harus bisa berkontribusi bagi daerah dimana dia ditugaskan, memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Maluku, walaupun nanti yang meneruskan tugas saya bisa siapa saja,” jelasnya saat wawancara dengan Media Keuangan di Kantor Wilayah BC Maluku beberapa waktu lalu.

Srikandi

Sebagai seorang wanita, ia memiliki banyak tantangan dalam bekerja terutama di lingkungan yang lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Saat mengenyam pendidikan di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) pun, ia harus bersaing dengan mahasiswa lain yang mayoritas laki-laki. Padahal program diploma kepabeanaan dan cukai yang ia pilih memiliki model pendidikan semi militer. Pasca kelulusan pun, ia harus mampu beradaptasi dengan cepat.

Ia ditempatkan pertama kali di Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta bidang Penyidikan dan Penindakan (P2). Di bidang yang jarang terdapat pegawai wanita tersebut, ia harus belajar mandiri dan belajar dari pengalaman pegawai senior dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. “Dari seluruh pegawai P2 yang ada di Kanwil Priok itu hanya dua orang wanitanya. Saya paling junior, belum tau apa-apa tentang tugas P2, tapi itu suatu tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga pernah bertugas di bidang tarif dan harga, bidang perbendaharaan, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), Bidang Analisis Tindak Lanjut Kepatuhan Internal, Bagian Umum, Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Bidang Pabean dan Cukai, Bidang Evaluasi Audit dan di Subdit Pencegahan Direktorat Kepatuhan Internal sebelum akhirnya dilantik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi Kepala Kantor Wilayah BC Maluku.

Sebelum berangkat ke Maluku, Finari pernah mendapat wejangan dari Sri Mulyani. Menkeu berpesan agar ia siap dalam bekerja dan mengabdikan kepada negara. Menkeu juga meminta agar sang suami memberikan dukungan kepadanya. “Waktu salaman dengan Bu Menteri, beliau bilang, ini satu-satunya wanita Bea Cukai yang dilantik. Bagaimana, siap? Siap Bu Menteri. Ini suaminya tolong dukung ya istrinya,” ceritanya.

Membangun ekonomi Maluku

Cerita menarik dimulai ketika ia dilantik menjadi salah satu eselon 2 wanita di lingkungan DJBC. Seharian sebelum dilantik, ia sebenarnya diberikan surat tugas dari kantor pusat ke wilayah Maluku. Namun, esoknya ternyata ia malah diberikan surat keputusan untuk memimpin Kantor Wilayah BC Maluku. Karena baru pertama kali ditempatkan di wilayah timur Indonesia, ia pun mencari informasi perihal kondisi dan potensi yang ada di Maluku. Ia melihat begitu

banyak potensi sumber kekayaan alam Maluku dan Maluku Utara. Misalnya, di daerah Tual terdapat potensi ekspor mutiara, ikan, dan juga gas bumi dari Blok Masela.

Saat ia masuk ke Maluku pada bulan September, ia melihat pentingnya menyiapkan pondasi dalam pengembangan dan peningkatan ekspor di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Beberapa produk Maluku selama ini ternyata ekspornya tidak dilakukan langsung dari Maluku, tetapi dominan melalui Surabaya dan Jakarta. Padahal, biaya logistik akan menjadi jauh lebih efisien apabila ekspor dilakukan langsung dari Maluku. Selain itu, ekspor dari Maluku ini penting dicatat karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku.

Sebagai pimpinan tertinggi DJBC Wilayah Maluku, ia memiliki visi melakukan sinergi bersama untuk membangun Maluku dan Maluku Utara. Ia pun melakukan koordinasi dengan sektor swasta dan publik agar dapat mengoptimalkan pengembangan perekonomian di wilayahnya. Contohnya, sinergi bersama antara Bea Cukai, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, pelindo, angkasa pura, BPS, Bank Indonesia, bahkan aparat hukum daerah yang bersama-sama dalam mendorong dan mendampingi industri kecil menengah di Ternate dan Ambon.

Hasilnya, tanggal 24 dan 25 Oktober 2017, Ternate berhasil melakukan ekspor perdana ikan *yellowfin* setelah 17 tahun lamanya absen. Sementara di Ambon, pada tanggal 16 Januari 2018 berhasil melakukan uji coba ekspor ikan *fresh yellowfin* ke Australia. Hal itu tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, namun juga mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Maluku yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Capaian itulah yang ingin ditulkarkannya kepada wilayah-wilayah lain di bawah pengawasannya agar dapat

menciptakan efek domino ekonomi yang berkelanjutan.

Disiplin dan nasionalisme

Jiwa nasionalis dan disiplin diri tak terlepas dari peran orang tuanya. Ayah Finari, Willy Manan, dan ibunya, Yang Arita Arifin, selalu mendidik agar anak-anaknya mampu mengemban tanggung jawab sedari kecil. Meski memiliki asisten rumah tangga, Finari dan keenam saudaranya tetap diberikan tugas dalam mengurus pekerjaan rumah. Tak ayal, hal tersebut mengajarkan nilai disiplin dan manajemen waktu, serta skala prioritas dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

Ayah Finari memiliki darah keturunan Sunda. Semenjak muda beliau merantau di Bangka yang merupakan tempat kelahiran ibunya. Ayahnya merupakan sosok yang penyabar, jujur dan pintar. Bekerja di sektor pertambangan, ayah Finari selalu mengajarkan sifat selalu bersyukur dan menerima setiap penugasan dengan ikhlas. Lebih jauh, dirinya memperoleh nilai-nilai kejujuran dari ayah dan ibunya. Ia selalu diajarkan untuk menyampaikan apa adanya dan tidak berusaha menutupi sesuatu apapun. Jika tidak, ia akan mendapatkan hukuman dari sang ayah. Sikap jujur itu pulalah yang menjadi cikal bakal nilai integritas dalam dirinya.

Di sisi lain, ibunya menjadi sosok yang paling dekat dengan dirinya. Agar dirinya dan saudaranya dapat mengenyam pendidikan yang baik, Finari dan saudaranya harus rela berpisah dengan ayahnya dan tinggal bersama ibunya di Bandung. Ibunya memiliki rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Saat di sekolah pun, Finari didorong agar ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, seperti menjadi pasukan pengibar bendera. Kegiatan Paskibra sangat melekat di hati Finari sehingga sampai saat ini ia memiliki kesan sendiri ketika mendenarkan lagu-lagu kebangsaan. “Ibu saya itu membesarkan 7 anak. Buat saya, ibu pekerja keras,



Berbagai kegiatan Finari Manan sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku.

Bersama Keluarga saat berlibur ke Pulau Ora.

Foto Dok. Kanwil Bea Cukai Maluku

mandiri, tangguh, tekun dan jujur. Setiap hari saya dididik untuk disiplin,” ungkapnya.

Komunikasi jarak jauh

Tinggal jauh dari keluarga tidak menjadi hambatanya dalam bekerja. Meski ikatan batin antara anak dan ibu tak bisa dipisahkan, Finari tetap berusaha menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan perannya sebagai ibu dan istri. Ia selalu menyempatkan diri berkomunikasi setiap harinya melalui perangkat

telepon atau panggilan video dengan anak-anaknya. Menurutnya, bekerja merupakan suatu ibadah. Karena itu, dimanapun ia ditempatkan, ia harus bisa bekerja sebaik-baiknya. Selain itu, ia memiliki prinsip bahwa tugas yang diembannya adalah tugas negara yang mulia dan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan begitu, ia yakin keluarganya juga akan selalu diberikan lindungan Allah.

Lebih jauh lagi, Finari menceritakan dukungan anak dan suaminya dari jauh. Suaminya, Selo Pasha Purnawarnantha, dan ketiga anaknya, Jilan Sulthanah, Alexandra Fathanah, dan Aurell Anindya Fadhilah, sudah mulai terbiasa dengan kondisi dan tuntutan pekerjaannya. Mereka selalu menyemangati dirinya dalam kondisi apapun. Salah satu yang membuatnya tenang adalah pesan dari dari keluarganya agar dirinya dapat fokus menyelesaikan amanah jabatan dengan baik. “Mereka bilang ke saya ‘Kerja yang benar, fokus, agar bisa cepat pulang bersama-sama dengan kita kembali’. Jadi saya merasa tenang,” ceritanya sembari mengenang keluarga.

Dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya, Finari berprinsip agama adalah nilai dasar yang harus ditanamkan. Ia memprioritaskan anak-anaknya agar dapat bersekolah di sekolah islam. Ia juga mengikutsertakan anak-anaknya dalam program pesantren kilat untuk mengisi jadwal libur panjang sekolah. Walau bekerja, ia tak pernah lepas mengajari dan memperhatikan masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Selepas pulang kerja, ia meluangkan waktu untuk mengajarkan beberapa mata pelajaran atau mengecek pekerjaan rumah dari anak-anaknya. Apabila musim ujian, ia selalu menyiapkan soal-soal agar anaknya selalu siap dalam menghadapi ujian.

Harapan

Dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara, Finari memiliki harapan untuk memajukan wilayah timur agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jauh dengan wilayah barat Indonesia. Lebih jauh, untuk mewujudkan hal tersebut ia berkomitmen agar pelayanan dari institusinya selalu baik, sehingga bisa menunjukkan sikap melayani dan berwibawa. Hal tersebut penting menjadi bekal yang harus disampaikan kepada generasi penerus di Bea Cukai. Terakhir, sebagai wanita ia ingin mengajak perempuan di seluruh Indonesia dan di Bea Cukai agar mampu bergerak bersama membangun negeri. “Wanita itu seperti matahari, sinarnya memberi banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Wanita harus mampu berkontribusi memajukan institusi dan negara tercinta. Insya Allah tidak ada kegalauan, kecemasan, ketakutan berinteraksi dengan orang-orang di sini (Ambon), mereka baik, sangat ramah dan menyenangkan,” kisahnya.

Teks Abdul Aziz



APBN Diharapkan Menjadi Fine Tuner Ekonomi

Realisasi APBN 2017 juga terlihat memberikan pencapaian yang baik terutama realisasi pendapatan

Menjelang rilis data pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2017, ekspektasi positif terhadap performa ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi terjaga. Hal ini seiring dengan dinaikkannya peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia Fitch pada bulan Desember 2017. Selain adanya pengakuan dari luar Indonesia, beberapa indikator perekonomian di dalam negeri juga menunjukkan perbaikan.

Perekonomian negara maju sesuai ekspektasi

Menjelang terbitnya rilis estimasi pertumbuhan ekonomi dunia dari beberapa lembaga internasional, terlihat adanya perkembangan positif, baik di negara maju maupun berkembang. Amerika Serikat (AS), misalnya, menunjukkan data penyerapan tenaga kerja sedikit mengalami peningkatan pada bulan Desember 2017 dengan total tambahan lapangan pekerjaan sebanyak 148.000. Meskipun tidak banyak, hal tersebut mengonfirmasi adanya *solid*

Foto Ilustrasi
Anas Nur
Huda

momentum bagi prospek AS di tahun 2018. Selain itu, berdasarkan data dari Departemen Tenaga Kerja AS, tingkat pengangguran tetap berada di level 4,1 persen atau dalam posisi terendah sejak tahun 2000.

Namun demikian, hal yang juga perlu diperhatikan terkait tingkat pengangguran yang sangat rendah ini adalah stagnannya peningkatan pendapatan, serta lebih lambatya pembukaan lapangan pekerjaan baru. Selain disebabkan juga oleh meningkatnya inflasi di AS, terdapat indikasi bahwa hal tersebut turut mendorong turunnya *consumer spending index* di AS sebesar 0,3 persen di tahun 2017. Di samping menjadi risiko dari negara maju, dampak yang perlu diwaspadai dari hal tersebut adalah adanya potensi meluas dan mempengaruhi perekonomian Indonesia ke depannya.

Seiring dengan membaiknya beberapa indikator tersebut, pada Desember 2017 lalu, suku bunga acuan AS kembali dinaikkan ke level 1,25-1,5 persen. Dengan demikian, kenaikan The Fed Fund Rate (FFR) di 2017 secara total berjumlah 75 basis poin. Meskipun sesuai ekspektasi pasar, sinyal perkembangan ekonomi AS yang masih *mixed* perlu diperhatikan. Hal ini sebagaimana tercermin dari hasil *voting* Federal Open Market Committee (FOMC) *meeting* yang terbagi menjadi dua. *Mixed signal* seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar.

Kondisi ekonomi domestik beragam, konsumsi belum kuat

Menjelang rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di kuartal keempat 2017, beberapa data menunjukkan perbaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa inflasi pada bulan Desember 2017 sebesar 0,71 persen. Sementara itu, secara tahun kalender 2017, besaran laju inflasi mencapai 3,61 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berada di level 3,02 persen. Kenaikan inflasi lebih disebabkan oleh kenaikan harga yang diatur pemerintah

(*administered price*), dimana di tahun 2017 terdapat kebijakan penyesuaian tarif listrik dan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Meski mengalami kenaikan, tingkat inflasi ini lebih rendah dari target pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, kondisi ini dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut terutama didukung oleh terkendalinya harga komponen bahan pangan. Namun demikian, meski tingkat inflasi lebih rendah dari target, beberapa indikator konsumsi belum menunjukkan penguatan. Pada Desember 2017, pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih dalam tren yang meningkat. Peningkatan impor barang konsumsi menjadi sinyal perbaikan sektor konsumsi. Namun, pertumbuhan konsumsi kendaraan dan listrik kembali melemah. Sementara itu, sepanjang tahun 2017, *consumer confidence* dan *retail sales index* juga mengalami fluktuasi.

Indikator investasi juga menunjukkan perkembangan beragam, namun tetap positif. Salah satunya pertumbuhan konsumsi semen yang masih melanjutkan tren yang positif. Selama periode Januari-November 2017 konsumsi semen meningkat 7,4 persen. Sementara itu, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Diketahui hingga Oktober 2017, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan mencapai 8,2 persen, atau sedikit meningkat dari bulan sebelumnya, namun menurun bila dibandingkan tahun 2016.

Selain itu, meskipun terjadi defisit di bulan Desember 2017, keseimbangan eksternal perekonomian Indonesia membaik secara umum selama tahun 2017. Tercatat Desember 2017 Indonesia mengalami defisit sebesar USD270,2 juta akibat tingginya harga minyak mentah internasional, secara kumulatif Neraca Perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD11,84 miliar. Ini menjadi tahun ketiga surplus berturut-turut

sejak tahun 2015 dan melampaui surplus setahun dalam tahun 2016. Walaupun diketahui pada Desember 2017, Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD270,2 juta yang diantaranya disebabkan oleh tingginya harga minyak mentah internasional.

Kondisi likuiditas cukup stabil dengan berbagai risiko

Berbeda dengan negara lainnya di kawasan regional, Rupiah ditutup pada nilai Rp13.551 per dolar AS pada akhir 2017, atau sedikit melemah sebesar 0,58 persen dibandingkan penutupan akhir tahun sebelumnya. Beberapa negara lain seperti Malaysia dan Thailand justru menguat di akhir tahun. Masing-masing sebesar 10,46 persen dan 9,56 persen. Pelemahan Rupiah terutama terjadi sejak bulan September 2017. Hal ini lebih disebabkan oleh masih adanya kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi dana keluar dari Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan dengan rencana *tax cut* di AS yang diperkirakan memicu meningkatnya kebutuhan pembiayaan APBN dari negara tersebut.

Selain itu, dari faktor domestik, semakin kecilnya selisih antara suku bunga acuan Indonesia dengan suku bunga acuan global FFR dikurangi dengan inflasi yang meningkat di tahun 2017 juga berkontribusi pada pelemahan nilai Rupiah. Namun demikian, Rupiah termasuk dalam mata uang yang stabil. Apabila menarik data historis yang lebih panjang, Rupiah hanya mengalami sedikit pelemahan saja setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami penguatan yang lebih besar dari negara lain. Selain itu, ada kemungkinan Rupiah terkena dampak *magnitude* dari salah satu komponen neraca pembayaran, yaitu neraca jasa, yang masih mencatatkan angka negatif pada Q3 2017.

Meskipun terdapat risiko demikian, performa pasar keuangan Indonesia cukup baik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat sebesar 19,2 persen di akhir 2017 menuju ke level 5.296.



Dhruv Sharma
Ekonom Bank Dunia

Peningkatan di tahun 2017 ini termasuk tinggi di kawasan regional dan berada di atas Malaysia dan Thailand yang hanya meningkat sebesar 8,4 persen dan 13,0 persen.

Pasar obligasi juga menunjukkan indikator yang sama, yakni mengalami peningkatan dengan turunnya *yield* SUN 10Y sebesar 165,40 basis poin menuju 6,32 persen di tengah peningkatan suku bunga acuan AS, serta masuknya dana asing sebesar Rp170,3 triliun ke pasar obligasi Pemerintah. Namun demikian, perlu diwaspadai juga perluasan dampak dari sentimen negatif yang masih mempengaruhi Rupiah. Dari pasar saham Indonesia, tercatat sebesar Rp39,9 triliun dana asing yang keluar dari pasar di tahun 2017.

Dengan kondisi domestik yang positif, suku bunga Bank Indonesia juga dipertahankan di bulan Desember 2017 di level 4,25 persen. Ruang pelonggaran kebijakan suku bunga memang semakin kecil setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunganya sebanyak 50 basis poin di tahun dimana FFR naik sebesar 75 basis poin, serta di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih *mixed*.

APBN sebagai fine tuner

Di tengah perekonomian yang datanya masih beragam di berbagai komponen pengeluaran, APBN berhasil dijaga dalam level yang *prudent* sehingga menjadi faktor penting untuk menjaga persepsi positif terhadap perekonomian domestik. Defisit APBN dapat dijaga dalam batas yang aman, yaitu 2,57 persen dari PDB, lebih rendah dari yang ditetapkan APBN-P 2017 yang sebesar 2,92 persen. Selain itu, perkembangan keseimbangan primer sebagai salah satu indikator sustainabilitas fiskal juga semakin baik. Keseimbangan primer sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat sebesar negatif Rp129,3 triliun, atau lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar negatif Rp178,0 triliun.

Selain itu, APBN 2018 juga dinilai lebih realistis diantaranya dengan target rasio defisit yang lebih kecil. Di tengah penerimaan negara yang belum menemukan momentum penguatan serta konsumsi rumah tangga yang masih belum sesuai ekspektasi, keputusan pemerintah untuk fokus mendorong investasi mendukung hadirnya persepsi positif. Hal ini dikonfirmasi dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh Fitch menjadi BBB dengan *outlook* positif. Dengan *structural reform packages* yang terus berlanjut, APBN diharapkan dapat menjadi *fine tuner* di tengah *political cycle* yang mulai berlangsung pada tahun 2018 ini.

Teks Adelia Pratiwi
Pegawai Badan Kebijakan Fiskal

Performa perekonomian Indonesia di tahun 2017 dipengaruhi terutama oleh penguatan investasi. Beberapa hal yang menjadi *highlight* perkembangan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan investasi yang mencapai level tertinggi selama lebih dari 4 tahun. Selain itu, nilai total aliran investasi langsung menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Pertumbuhan ekspor dan impor juga menembus *double digit* pertama kali sejak 2012.

Kondisi ekonomi global di tahun 2017 memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Secara khusus, harga komoditas yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih tinggi, perdagangan internasional yang *rebound*, serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang relatif akomodatif memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Perkembangan baik lainnya di tahun 2017 adalah adanya dua *upgrades* atas peringkat utang Indonesia. Pertama, di bulan Mei, Standard&Poors meningkatkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi (dari status *junk*), kemudian tak lama Fitch menaikkan peringkat Indonesia menuju level BBB dengan *outlook* stabil.

Konsumsi dan investasi akan terus menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi di 2018. Keberlanjutan reformasi di tahun 2018 menjadi penting di tengah pemilu Presiden 2019. Momentum reformasi pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan peringkat kredit Indonesia di tahun 2017. Hal itu terjadi terutama karena Indonesia fokus pada peningkatan kemampuan dalam menghadapi gangguan eksternal melalui komitmen menjaga fiskalnya.

Realisasi APBN 2017 juga menunjukkan capaian yang baik, terutama dari sisi realisasi penerimaan. Pasar umumnya akan memberikan reaksi positif terhadap kondisi ini. Upaya untuk terus menjaga keamanan fiskal akan terus membuat pasar semakin positif.

Mengenai depresiasi Rupiah, setelah pemilu AS di 2016, Rupiah menjadi stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi mengingat Rupiah menggunakan nilai tukar yang mengambang, sehingga fluktuasi nilai tukar yang kecil menjadi hal biasa. Depresiasi marginal dari Rupiah bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan terutama dengan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga dengan baik.



Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank Group 2018

Pertemuan terbesar tahunan di bidang Ekonomi dan Keuangan

Nusa Dua-Bali,
8-14 Oktober 2018

Manfaat:



Makin dikenalnya produk Indonesia di pasar Internasional dan meningkatnya **PELUANG INVESTASI** serta transaksi **PERDAGANGAN**



Penerimaan devisa dari kehadiran **+15.000** peserta dari **189** negara



TRANSFER PENGETAHUAN melalui **+2.000** pertemuan isu perekonomian terkini dan penyelenggaraan pertemuan internasional.



Meningkatkan **REPUTASI** dimana Indonesia akan semakin dipercaya dalam menyelenggarakan kegiatan berskala internasional



Meningkatnya kunjungan **WISATAWAN** mancanegara ke Indonesia

www.am2018bali.go.id

The 2018 IMF-WBG Annual Meetings Bali

@am2018bali

@am_2018_bali

2018 IMF-WBG Annual Meetings Bali

Refleksi Perekonomian 2017 Menuju Momentum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 2018

Teks Mahpud Sujai,

Peneliti Madya, PKPPIM, BKF,
(Kementerian Keuangan *)

Perekonomian Indonesia tahun 2017 mendapat banyak capaian dari berbagai sektor. Situasi perekonomian global yang tidak pasti sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian domestik di tahun 2018. Refleksi kondisi dan capaian yang telah terjadi di 2017 perlu dilakukan untuk menyambut tahun 2018 yang lebih baik.

Perekonomian global diperkirakan dalam posisi lemah namun akan mengalami perbaikan di tahun mendatang. Berdasarkan proyeksi dari *International*

Monetary Fund (IMF), ekonomi global tumbuh sebesar 3,6 persen pada tahun 2018 atau meningkat dari tahun 2017 sebesar 3,5 persen. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global tersebut diiringi oleh kenaikan pertumbuhan perdagangan global yang diproyeksikan berada pada kisaran 3,9 persen pada tahun 2018 atau meningkat dari 3,8 persen dari tahun 2017.

Meski pertumbuhan perekonomian global telah menunjukkan adanya perbaikan, masih terdapat berbagai risiko yang tidak pasti. Faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketidakpastian di negara maju, perubahan struktur dan reformasi ekonomi di negara berkembang, serta faktor geopolitik merupakan risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, kebijakan *proteksionisme* di beberapa negara terutama Amerika Serikat (AS) dapat memberikan efek negatif terhadap perdagangan global.

Refleksi Perekonomian 2017

Peningkatan kinerja perekonomian Indonesia menghasilkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,05 persen atau lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 5,02 persen. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh konsumsi rumah tangga yang relatif stabil meski terdapat pergeseran konsumsi yang perlu diwaspadai. Selama tahun 2017, aktivitas ekspor impor Indonesia menunjukkan perbaikan seiring dengan peningkatan permintaan dan harga. Hal tersebut tampak pada kinerja Neraca Perdagangan

Indonesia selama Januari hingga November tahun 2017. Tercatat surplus perdagangan internasional (*trade surplus*) sebesar USD12,02 miliar. Surplus perdagangan tersebut lebih besar jika dibandingkan surplus perdagangan yang terjadi di tahun 2016 yang mencapai USD9,5 miliar.

Dari sektor perdagangan, net ekspor nonmigas terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 1,1 persen pada bulan November 2017. Sementara itu, net ekspor migas mengalami penurunan sebesar 1 persen pada bulan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sektor nonmigas lebih dapat dijadikan tumpuan saat perdagangan sektor migas Indonesia mengalami penurunan. Pertumbuhan di sektor manufaktur cukup menggembirakan. Dengan dominasi kontribusi berasal dari ekspor, tingginya pertumbuhan ekspor sektor manufaktur selama tahun 2017 telah mendorong surplus neraca perdagangan yang lebih besar.

Selama tahun 2017, kinerja perdagangan yang meningkat didorong oleh peningkatan permintaan negara-negara mitra dagang utama dan peningkatan harga komoditas global. Sementara itu untuk impor, peningkatan pertumbuhan lebih didorong oleh permintaan domestik yang masih cukup tinggi, baik impor dalam bentuk barang modal atau bahan baku, maupun impor dalam bentuk barang konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 didorong oleh peningkatan penanaman modal dan investasi yang terbagi dalam penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Peningkatan penanaman modal dan investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Hal itu disebabkan oleh pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, peningkatan investasi di tahun 2017 juga dipengaruhi oleh perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang terus dilakukan reformasi perbaikan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari meningkatnya daya saing Indonesia dan kemudahan berusaha yang terus membaik. Peringkat kemudahan bisnis di Indonesia naik ke posisi 72 atau meningkat 19 peringkat dari posisi 91 di tahun 2016. Keterangan lain yang dapat dilihat adalah meningkatnya impor bahan baku dan barang modal yang tumbuh sebesar 16,3 persen dan 9,2 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa investasi dan pembangunan terus meningkat di Indonesia.

Meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tingkat inflasi masih dapat dijaga dalam posisi yang stabil. Tingkat inflasi yang terjadi selama tahun 2017 mencapai 3,6 persen atau

Peningkatan kinerja perekonomian Indonesia menghasilkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,05 persen atau lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 5,02 persen.



Ilustrasi
Venggi Ovisa

lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3,9 persen. Pencapaian laju inflasi yang lebih rendah terutama didukung oleh terkendalinya harga sepanjang tahun 2017, terutama harga-harga komoditas pangan.

Pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk menjaga laju inflasi. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain pemantauan harga, perbaikan tata niaga komoditas pangan, peningkatan koordinasi kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan sektor riil dalam menjaga pasokan. Selain itu, koordinasi kebijakan pusat dengan pemerintah daerah, serta menjaga faktor fundamental untuk kestabilan nilai inflasi inti (*core inflation*).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya perekonomian global selama tahun 2017 diharapkan menjadi landasan dan fondasi yang kuat dalam melanjutkan pembangunan perekonomian di tahun 2018. Tahun 2018 dan tahun 2019 mendatang merupakan tahun politik dimana akan terjadi pesta demokrasi yang besar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta momentum perbaikan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Momentum Perbaikan Ekonomi

Perbaikan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi dipicu oleh membaiknya perekonomian di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang terutama *emerging economies* menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global. Perekonomian negara berkembang memiliki *trend* perbaikan perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun saat ini, negara-negara maju telah menunjukkan *trend* perbaikan perekonomian, terutama di Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa.

Trend perbaikan pertumbuhan ekonomi global menjadi momentum yang sangat baik bagi Indonesia untuk terus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Perbaikan kondisi perekonomian global dengan negara mitra dagang utama dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan Indonesia. Dengan perbaikan kondisi perekonomian global, ekspor diproyeksikan akan semakin meningkat dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap devisa negara dan meningkatnya kinerja penerimaan negara, terutama yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Momentum perbaikan ekonomi Indonesia diharapkan dapat didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi dalam negeri, peningkatan investasi dan penanaman modal untuk meningkatkan kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia. Momentum tersebut didukung dengan membaiknya status peringkat utang Indonesia. Peringkat utang Indonesia naik dari BBB- menjadi BBB oleh Fitch Rating dengan *outlook* stabil pada akhir tahun 2017. Kenaikan peringkat utang Indonesia menjadikan semua lembaga rating memasukan Indonesia ke dalam negara yang layak untuk tempat investasi (*investment grade*).

Faktor lain yang mendukung momentum perbaikan ekonomi adalah harga komoditas global yang membaik. Indonesia sebagai salah satu negara yang masih mengandalkan komoditas untuk menopang pertumbuhan perekonomian sangat diuntungkan dengan komoditas global yang membaik. Indeks harga komoditas global terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh, selama tahun 2017 lalu harga minyak Brent telah meningkat sebesar 23,2 persen, harga logam meningkat sebesar 24,9 persen, harga batubara meningkat sebesar 38,9 persen dan komoditas pangan meningkat sebesar 8,5 persen.

Momentum perbaikan ekonomi di tahun 2018 didorong oleh berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Beberapa proyek infrastruktur yang akan selesai di tahun 2018 antara lain adalah proyek tol trans Jawa yang diharapkan akan tersambung seluruhnya dengan nilai investasi yang dikeluarkan di tahun 2018 sebesar Rp44 triliun, Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat, LRT (*Light Rail Transit*) untuk Asian Games di Jakarta dan Palembang serta berbagai proyek lainnya.

Tahun 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai *event* internasional seperti Asian Games 2018 dan Annual Meeting IMF-World Bank 2018. Pelaksanaan *event* internasional di Indonesia diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama dari peningkatan jumlah kunjungan asing ke Indonesia yang dapat meningkatkan pemasukan devisa negara. Selain itu, pilkada serentak tahun 2018 di berbagai wilayah di Indonesia juga secara langsung akan meningkatkan konsumsi domestik yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kondisi dan kegiatan pembangunan yang terjadi di 2018 menjadi harapan tercapainya momentum yang baik dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akhirnya, semua capaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia secara adil dan merata.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

Jangan Lupa Sampaikan LP2P dan LHK 2017!



KLIK! ALPHA

alpha.kemenkeu.go.id

petunjuk ringkas
bit.ly/alphaitjen

SEBELUM TANGGAL



Pupuk Ilmu Sekarang, Jadi Menteri Kemudian

“Aku sendiri bercita-cita jadi menteri. (mulai sekarang) dipupuk dulu ilmunya,” demikian ungkap Tasya Kamila, selebriti muda Indonesia, saat diwawancara Media Keuangan beberapa waktu lalu. Sebuah pernyataan lugas yang ia buktikan dengan semangatnya menjalani pendidikan di Columbia University, Amerika Serikat. Salah satu universitas paling prestius di dunia.

Lingkungan menjadi isu yang diminati gadis kelahiran Jakarta, 22 November, pada 25 tahun silam ini. Setelah menyelesaikan studi sarjana dengan predikat *cumlaude* di Universitas Indonesia, Tasya—demikian dia biasa dipanggil—bersegera melanjutkan pendidikan pascasarjananya melalui seleksi beasiswa yang diselenggarakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Public Administration dengan konsentrasi pada *Environmental Policy and Management* menjadi bidang yang dia pilih. Diakui Tasya, energi dan lingkungan memang menarik hatinya. Sejak 2006 saja, Tasya telah aktif sebagai salah satu duta lingkungan. “Jadi dari saat menjadi duta lingkungan, aku terus terinspirasi untuk melakukan aksi lingkungan, menyebarkan pesan lingkungan, dan *campaign* (yang terkait) lingkungan,” akunya.

Lingkungan dan energi

Bagi Tasya, menjadi duta lingkungan belumah cukup. Dia menyadari sepenuhnya bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai target penanganan lingkungan adalah dengan terlibat dalam hal kebijakan dan penegakan hukumnya. Karena alasan itulah, Tasya memilih bidang studi seperti yang dia jalani sekarang.

“Salah satu yang berpengaruh besar bagi negara agar bisa mencapai target-target lingkungan adalah dengan *policy* dan *enforcement* lingkungan yang baik. Jadi aku masuk ke (bidang studi) kebijakan lingkungan,” jelasnya. Luasnya isu lingkungan baru diketahui Tasya saat menjalani pendidikan. School of International and Public Affairs sebagai salah satu fakultas pascasarjana di Columbia University, tempat Tasya menimba ilmu, memberikan banyak pandangan baru terkait lingkungan.

“Salah satu yang menarik (buat) aku adalah *renewable energy*. Apalagi, (*renewable energy*) masih *emerging*, mau akan berkembang, dan butuh *financing*, butuh strategi dan kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif supaya teknologinya bisa berkembang dan bisa bersaing dengan teknologi energi fosil (saat ini),” paparnya.

Menjatuhkan pilihan

Cita-cita belajar ke luar negeri pada tingkat pascasarjana sudah lama diidamkan gadis lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan predikat *cumlaude* ini. Keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan menuntut ilmu di salah satu universitas terbaik di dunia menjadi alasan terkuatnya. Untuk itulah, Tasya menjatuhkan pilihan mengikuti seleksi beasiswa luar negeri yang dilaksanakan LPDP.

Menurut Tasya, negara melalui LPDP berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia. Nantinya para *awardee* yang dibiayai pendidikannya, diharapkan bisa memberi sumbangsih kepada negara. Pilihannya untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, juga menjadi sebab ia menjatuhkan pilihan pada LPDP.

“Menurutku, LPDP untuk kuliah di Amerika Serikat itu beasiswa yang paling *general*, dan pastinya dengan ambil LPDP memantapkan aku untuk berkontribusi di Indonesia. Jadi (hal ini) aku jadikan amanah,” terangnya.

Proyek dan yayasan

Dalam proses seleksi beasiswa, LPDP menekankan aspek terkait kontribusi apa yang siap diberikan para calon *awardee* sekembalinya dari tugas belajar. Terkait hal ini, Tasya menceritakan sejumlah proyek



yang sudah mulai ia laksanakan saat menjalani pendidikan beasiswa. “Dari sekolah saja, aku sudah buat proyek di Sumba, Nusa Tenggara Timur. (Proyek ini) berupa proyek energi yang ramah lingkungan (dengan) menggunakan biodiesel untuk menghasilkan listrik,” jelasnya.

Tasya menambahkan, bio diesel yang digunakan berasal dari tumbuhan di daerah Sumba. Proyek yang digarap sengaja dilakukan di salah satu daerah yang belum memperoleh fasilitas dan akses listrik. “Aku ingin membantu akses ke energi ramah lingkungan”, tekadnya. Diakui Tasya, dirinya telah memiliki yayasan yang bergerak di bidang lingkungan yang diberi nama Green Movement Indonesia. Meski baru berdiri pada 2015 dan vakum sejak 2016 sejak dirinya menjalani pendidikan di luar negeri, yayasan tersebut sudah banyak melakukan kegiatan di sejumlah sekolah. Kegiatan yang dilakukan tidak jauh dari edukasi yang terkait dengan lingkungan.

Jadi konsultan

Memasuki semester akhir pendidikan, School of International and Public Affairs memberlakukan aturan kelulusan bukan dengan tesis, melainkan *capstone project*. “Jadi satu tim konsultan meng-*handle*



Tasya Kamila semangat menjalani pendidikan di Columbia University, Amerika Serikat.

Foto dok. pribadi.

satu *client* dengan *real world problem*. Kita jadi *graduate consultant* dalam satu tim yang beranggotakan delapan orang. Selanjutnya setiap tim membuat laporan tertulis dan memberikan presentasi terkait *advice*-nya kepada klien,” terangnya. Diceritakan Tasya, setiap tim akan menangani satu klien yang berasal dari pemerintah, non governmental organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat, maupun perusahaan. Tasya sendiri tergabung dalam tim yang menangani kasus dari General Electric (GE) Energy yang terkait dengan *renewable energy* di *storage*.

Aktivitas lain

Sibuknya jadwal perkuliahan tidak membuat Tasya pasif menjalani aktivitas lain. Pada 2018, Tasya ditunjuk menjadi *project officer* untuk kegiatan Sustainable Development Solution Network News. Selain itu, dia juga menjadi pengurus dari Southeast Asian Students Initiative (SEASI). Sebuah wadah mahasiswa untuk berdiskusi terkait isu-isu penting di kawasan Asia Tenggara, baik ekonomi, lingkungan, dan keamanan.

“Jadi kita bikin event untuk mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya dari Asia Tenggara, tapi juga mereka yang tertarik dengan isu-isu di Asia Tenggara. Kita adakan diskusi dengan *speaker*

yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara. Kalau ada orang-orang penting dari Asia Tenggara yang berkunjung ke New York, kami usahakan dapat diundang untuk bicara di kampus,” jelasnya.

Selain kegiatan diskusi, wadah ini juga seringkali mengadakan acara budaya, seperti seperti makanan khas dan seni. “Kita memperkenalkan makanan dari Asia Tenggara. Termasuk, kelompok tari Saung Budaya dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York, pernah kita undang ke kampus untuk mengenalkan budaya Indonesia,” kisahnya.

Harapan

Dalam menjalani pendidikan, Tasya berharap para penerima beasiswa LPDP bersedia secara tulus berkontribusi untuk Indonesia. “Apapun bentuknya dan kapan pun terealisasinya. Yang penting punya niat dan punya aksi nyata buat Indonesia,” pesannya.

Di akhir wawancara, Tasya juga menitipkan harapannya kepada LPDP. “Semoga LPDP menjadi lembaga yang profesional, berintegritas dan menjadi lembaga terbaik dalam memberikan beasiswa kepada warga Indonesia,” tutupnya.

Teks Farida Rosadi

Keadilan di Era Keterbukaan Informasi

Teks Harlinda Siska Pradini, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 memberikan kewenangan bagi otoritas pajak dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Regulasi ini sekaligus menjadi pembuktian komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran otomatis informasi rekening keuangan. Tidak hanya di lingkup global, keterbukaan informasi perpajakan juga menyentuh lembaga jasa keuangan domestik.

Di level internasional, Indonesia telah menjalin kerjasama pertukaran data keuangan dengan beberapa negara. Deklarasi bersama semacam ini akan memperkuat basis data perpajakan. Di skala nasional, sektor perbankan, perasuransian, perkoperasian, dan pasar modal wajib menyampaikan laporan informasi keuangan berkala maupun informasi/bukti atau keterangan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Di era sekarang, informasi menjadi salah satu kunci dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak.

Informasi dalam Perspektif Teoritis

Robert Hayes (1997) menganggap informasi sebagai sumber daya modal. Berbeda dengan sumber daya modal lainnya, informasi memiliki keunikan karakteristik tersendiri. Fattahi dan Afshar (2005) dalam artikelnya “*Added value of Information and information systems: a conceptual approach*” menjelaskan berbagai kapabilitas dan keunikan nilai dari informasi.

Pertama, informasi dapat diperjualbelikan karena mampu menghasilkan nilai tambah. Jual beli informasi tidak akan menghilangkan nilai dan kontennya. Kedua, dapat digunakan kembali. Informasi menghasilkan lebih banyak dibandingkan upaya perolehannya. Ketiga, dapat dibagi. Informasi dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna tanpa resiko penyusutan.

Keempat, dapat didistribusikan dengan mudah. Transfer informasi dilakukan dengan biaya minimal. Perkembangan teknologi mempercepat proses ini. Kelima, dapat diolah. Informasi dapat diproses sesuai rencana atau program untuk menghasilkan informasi baru dan dimanfaatkan untuk tujuan

lain. Pengolahannya lebih sederhana, membutuhkan sedikit sumber daya dan memberikan imbal hasil lebih tinggi dalam jangka panjang.

Keenam, dapat disempurnakan. Penambahan informasi dari waktu ke waktu berimbas pada sulitnya pencarian informasi sehingga perbaikan diperlukan untuk mengeliminasi informasi yang tidak diperlukan. Terakhir, informasi dapat diartikan, disimpulkan dan disesuaikan. Perbedaan interpretasi terhadap informasi menjadikannya sebagai komoditas yang dapat digunakan dengan berbagai pendekatan.

Dalam praktik perpajakan, informasi menjadi salah satu sumber daya penting dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Ketersediaan informasi dapat mengurangi asimetri informasi antara fiskus dan wajib pajak (Khucumova, 2017). Pelaporan informasi dari pihak ketiga membantu fiskus dalam memperoleh data akurat tentang pendapatan wajib pajak.

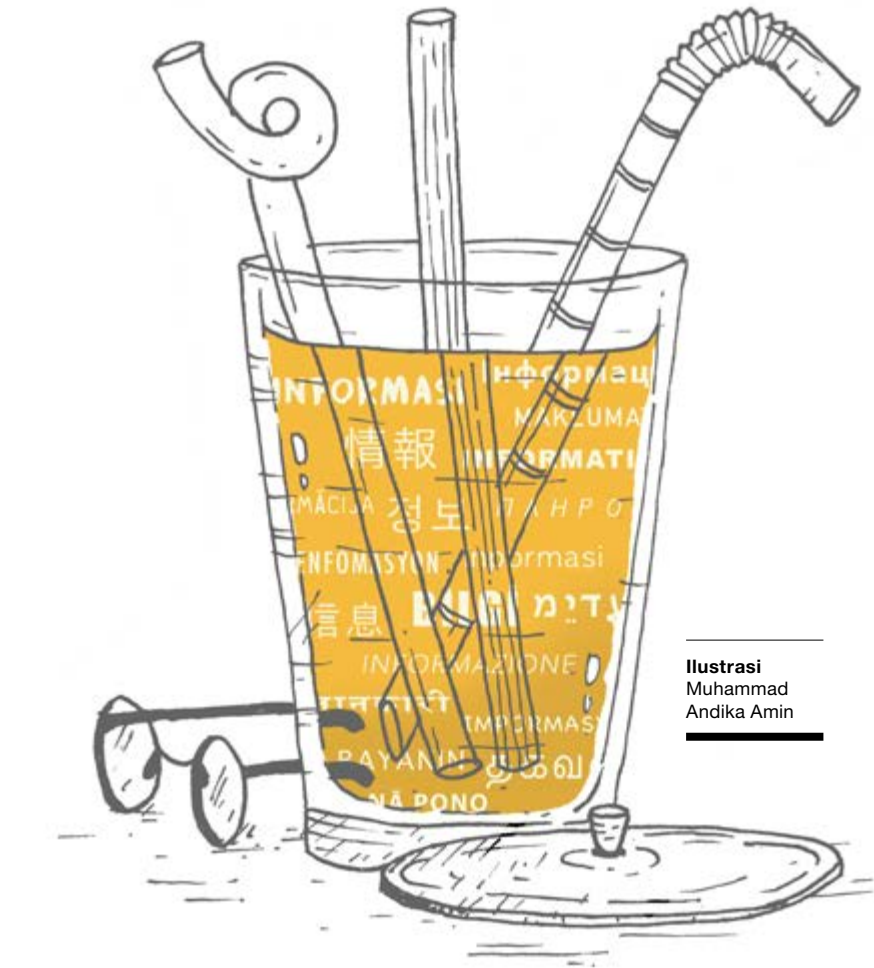
Dengan kata lain, pelaporan informasi akan mengurangi ketidakpastian prediksi maupun perhitungan penghasilan wajib pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, jaminan kualitas informasi diperlukan. Gallemore and Labro (2015)

mengidentifikasi faktor aksesibilitas, kegunaan, keandalan, akurasi, kuantitas dan ketiadaan *noise*/gangguan terhadap data sebagai tolak ukur kualitas informasi.

Secara konseptual, pelaporan informasi dan audit perpajakan adalah dua hal yang berbeda. Baik audit maupun pelaporan informasi membantu fiskus dalam mengakses informasi tentang penghasilan wajib pajak, namun keduanya memiliki metode yang berlainan.

Audit mengungkapkan keseluruhan atau rincian informasi tentang satu wajib pajak sementara pelaporan informasi mengungkapkan sebagian informasi tentang sebagian besar atau keseluruhan wajib pajak (Khucumova, 2017). Walaupun berbeda, keberadaan pelaporan informasi dapat meningkatkan efektifitas audit perpajakan karena dapat mengarahkan dan memberikan sinyal kepada petugas pajak dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian Khucumova (2017) menyimpulkan bahwa di tengah keterbatasan sumber daya penegakan hukum, investasi pelaporan informasi menjadi poin penting dan kritis. Di negara-negara berkembang, adanya perluasan pelaporan informasi khususnya melibatkan peran serta lembaga keuangan



Ilustrasi
Muhammad
Andika Amin

akan memperoleh keuntungan lebih besar. Bird and Zolt (2008) juga menekankan pentingnya kemajuan teknologi di negara berkembang dalam menyederhanakan penerapan pelaporan informasi.

Keadilan Perpajakan

Era keterbukaan informasi akan menjadi roda penggerak bagi reformasi perpajakan nasional. Keterbukaan informasi menjadi salah satu ikhtiar dalam mewujudkan keadilan perpajakan. Keadilan dengan berbagai prinsip dan sudut pandang telah menempatkan keadilan horisontal dan vertikal sebagai bagian di dalamnya (Holtzman, 2007).

Keadilan vertikal bicara soal perbedaan kemampuan membayar. Di Indonesia, tarif pajak progresif menjadi

salah satu cerminan dari keadilan vertikal. Keadilan horisontal mempersyaratkan bahwa pembayar pajak dengan kemampuan membayar yang sama akan menerima perlakuan pajak yang serupa.

Keterbukaan informasi akan membantu untuk memastikan bahwa setiap warga negara telah berkontribusi sebagaimana mestinya sehingga tidak akan lagi terdengar keluhan dari wajib pajak bahwa masih terdapat perbedaan perlakuan pajak yang berakibat pada penurunan daya saing bisnis.

Terciptanya keadilan perpajakan tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan nasional yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan Barang Bawaan Diubah, Penumpang Bisa Belanja Lebih Banyak

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas impor, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada 27 Desember 2017. PMK ini berlaku sejak 1 Januari 2018. Hal yang diatur di dalam PMK ini adalah hal-hal yang terkait dengan ekspor dan impor barang yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut, termasuk kenaikan *threshold* barang bawaan penumpang dan perubahan tarif bea masuknya. Dengan berlakunya PMK 203, ketentuan mengenai impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11, pasal 13 sampai dengan pasal 18, dan pasal 32 sampai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu poin penting yang diatur dalam PMK 203 ini adalah mengenai pembebasan bea masuk dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut. Sesuai ketentuan Pasal 12 dan

14, terhadap barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan/*personal use* yang diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean, dengan nilai pabean paling banyak FOB (*free on board*) US\$500 (barang pribadi penumpang) atau FOB US\$50 (barang pribadi awak sarana pengangkut) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Selain menaikkan batasan pembebasan bea masuk, PMK ini juga menghapus ketentuan barang bawaan keluarga untuk barang pribadi penumpang.

Ketentuan Ekspor Barang

Selain kenaikan barang bawaan yang dibawa dari luar negeri (impor), PMK 203 juga mengatur mengenai ekspor barang bawaan yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut ke luar negeri, baik berupa perhiasan, barang yang akan dibawa kembali, uang tunai ataupun instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau mata uang asing yang setara, dan barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Barang ekspor bawaan dimaksud harus diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), penumpang yang membawa barang ekspor tersebut dengan tujuan untuk

diperdagangkan wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, nota pelayanan ekspor, cetak tiket dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional.

Untuk memperlancar proses ketika kembali ke tanah air, PMK 203 memberikan kemudahan prosedur bagi para penumpang yang akan membawa barang-barang ke luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia, sehingga pada saat tiba di bandara Indonesia mendapatkan kepastian dan kelancaran pengeluarannya. Sesuai ketentuan PMK 203 pasal 4 ayat (2), barang ekspor yang akan dibawa kembali ke daerah pabean oleh penumpang wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik ataupun tulisan di atas formulir. Selanjutnya untuk aturan barang ekspor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut, kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Suasana pengecekan barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno Hatta.

Foto dok. pribadi.

undangan mengenai bea keluar. Contohnya apabila seseorang bepergian ke luar negeri dan membawa sepeda, maka orang tersebut harus menginformasikannya kepada petugas Bea Cukai di terminal keberangkatan dan menunjukkan bukti pemberitahuan tersebut pada saat dia kembali ke Indonesia. Prosedur ini akan memudahkan petugas untuk mempercepat proses *clearance* dan tidak akan dikenakan pungutan apapun.

Terkait dengan barang bawaan ekspor berupa uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, penumpang wajib memberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain. Pemberitahuan disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional, baik dalam bentuk data elektronik maupun tulisan di atas formulir.

Aturan Barang Impor

Seperti halnya barang ekspor, PMK ini juga menegaskan bahwa barang impor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis pada tempat tertentu dan aturan teknisnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa pemberitahuan secara tertulis disampaikan menggunakan *customs declaration* atau pemberitahuan impor barang khusus.

Selain diberikan pembebasan bea masuk, menurut PMK ini, terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan, 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya. Dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Adapun terhadap barang pribadi awak sarana pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB US\$ 50 per orang untuk setiap kedatangan, menurut PMK ini, diberikan pembebasan bea masuk. Terhadap kelebihan dari batasan ini dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Penyederhanaan Tarif

Terhadap kelebihan atas barang bawaan penumpang maupun awak sarana pengangkut dilakukan penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk, yang sebelumnya dihitung *item per item* barang menjadi hanya tarif tunggal sebesar 10 persen. Pemberlakuan tarif tunggal ini sesuai dengan praktik internasional, seperti halnya Singapura (7 persen), Jepang (15 persen), dan Malaysia (30 persen).

Terhadap barang bawaan penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB

US\$500, berlaku ketentuan tarif bea masuk yang ditetapkan sebesar 10 persen. Nilai pabean tersebut dihitung berdasarkan pada keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang yang dikurangi dengan FOB US\$500. Demikian juga terhadap barang impor bawaan awak sarana pengangkut yang memiliki nilai pabean melebihi FOB US\$50, tarif bea masuknya ditetapkan sebesar 10 persen dan nilai pabean yang ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan awak sarana pengangkut dikurangi dengan FOB US\$50.

Penutup

Penerbitan aturan PMK 203/2017 dilatarbelakangi adanya pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan dan peningkatan pendapatan per kapita warga negara Indonesia, serta aspirasi masyarakat. Pemerintah memfasilitasinya dengan mengedepankan kemudahan, simplifikasi prosedur, kepastian layanan dan transparansi kebijakan. Kenaikan batasan minimal pembebasan barang bawaan penumpang kiranya sudah sesuai dengan *best practice* negara lain dan nilai pabean FOB yang masuk dari bandara internasional di Indonesia. Penghapusan istilah keluarga dalam ketentuan PMK 203/2017 juga mengurangi waktu verifikasi hubungan keluarga penumpang yang tidak lazim dipraktekkan di dunia internasional.

Teks Budi Sulistyو



Dedikasi Memberikan Nutrisi Rohani

Ibu lima orang anak ini tak ingin hanya disibukkan dengan rutinitas pekerjaan di kantor. Ia bertekad memberikan nilai lebih dalam bekerja.

Lahir pada tanggal 24 Agustus di kota Bantul, Yogyakarta membuat wanita ini tumbuh dalam suasana keluarga yang mengajarkan *unggah-ungguh* (sopan santun), mandiri, serta toleransi. Permainan anak-anak di lingkungan masa kecilnya selalu membuat beliau bahagia. Wanita yang masa kecilnya menyukai permainan anak-anak seperti *gobak sodor*, *loncat tali* dan *petak umpet* ini dikenal dengan nama Prapti Utami.

Kegemarannya membaca sudah ditanamkan oleh ayah ibunya sejak kecil. Bersama dengan dua orang saudaranya, Prapti gemar membaca buku anak-anak, majalah, dan mendengarkan cerita anak-anak dari kaset. Pola asuh dari kedua orang tuanya yang demokratis, selalu mendengarkan, namun tetap memberikan arahan menjadikan Prapti tumbuh sebagai anak bertanggung jawab dalam mengambil keputusan.

Sejak SMP, ibu yang hobi memasak makanan kesukaan keluarga besarnya ini terpacu untuk terus berprestasi setelah ia diterima di sekolah yang terbilang kurang favorit di Bantul. Ketekunan dan semangat membuat ia bisa mencapai prestasi yang berhasil membuat haru kedua orang tuanya dan bisa diterima di SMA unggulan.

“Saya masuk kelas IPS, satu hal yang begitu mengetuk hati saya adalah perkataan dari salah seorang guru yang sudah *sepuh*

(tua). Beliau menantang ‘kalian ini mau ke mana lagi selain masuk STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara).’” Kata-kata ini memacu dan membuat Prapti untuk terus meningkatkan prestasi. Pepatah bahwa ‘ketekunan akan membuahkan hasil’ itu benar.

Pada tahun 1994 Prapti mendaftar Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), namun hatinya masih terpaut pada penerimaan mahasiswa STAN. Semangatnya untuk mendaftar di sekolah kedinasan tersebut akhirnya berbuah manis. Prapti berhasil diterima di Program Diploma III STAN spesialisasi Pengurusan Piutang Lelang Negara (PPLN) dan kemudian lulus pada tahun 1997. Penempatan pertamanya di Kantor Pusat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang kemudian bereformasi menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada tahun 2006.

Aktif dalam Bintal DJKN

Prapti Utami menyukai teladan Rasulullah. Ini yang mengantarkan dirinya aktif dalam Pembinaan Mental (Bintal) DJKN. Sebelumnya, wanita yang berdomisili di Jurangmangu, Tangerang Selatan ini terlibat dalam organisasi Keputrian Mushola Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jakarta. Di sana, ia dan teman-temannya se-lingkungan Kanwil Jakarta mengelola kegiatan majelis taklim keputrian untuk karyawan. Kegiatan majelis taklim tersebut berisikan pembelajaran Al-Qur’an dan juga berbagai kegiatan sosial.

Setelah mendapatkan amanah baru di Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) DJKN pada tahun 2014, Prapti berusaha menyusun kegiatan serupa untuk lingkungan Kantor Pusat DJKN. Di bawah naungan Bintal DJKN, Prapti rajin memberikan *mentoring* yang dibuat berkelompok berisi materi-materi islami untuk pegawai Kementerian Keuangan berstatus OJT (*on the job training*). “Mereka (para pegawai baru) adalah aset sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang langkah kariernya masih panjang dan harus diberikan nilai-nilai positif. Dengan pembinaan rohani yang baik, mereka diharapkan dapat memberikan karya terbaik bagi Kementerian Keuangan.

Prapti menambahkan, *mentoring* kerohanian yang rutin dilakukan seminggu sekali tidak hanya bermanfaat untuk menguatkan mental rohani bagi para pegawai. Namun juga bisa menjalin keakraban dan kekompakan di antara para pegawai baru. Materi kehoranian yang tidak akan ditemukan pada diklat atau pelatihan di kantor ini pun memberikan nuansa baru bagi pegawai sebelum menjalani rutinitas pekerjaan.



Prapti menegaskan, kegiatan *mentoring* di bawah naungan Bintal DJKN ini merupakan bentuk penguatan integritas, amanah, komitmen, dedikasi, kejujuran, dan profesionalisme yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan relevan dengan nilai-nilai dalam Al Quran dan Al Hadits. “Dalam Islam, ada istilah *itqon* yang berarti profesional. Nilai yang baik ini tentunya akan berdampak baik pula saat diterapkan di lingkungan kerja,” jelasnya. Kegiatan kerohanian ini tidak hanya dikhususkan oleh pemeluk agama Islam saja, namun untuk semua agama yang juga akan difasilitasi mentor dan diberikan panduan materi.

Membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan

Prapti tertawa kecil saat dilontarkan pertanyaan bagaimana cara membagi waktu antara kehidupan di kantor dan di rumah. Ia menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai empat orang putra dan satu orang putri. Wanita yang hobi memasak ini mengakui bahwa tidak mudah menjadi sosok ibu bekerja sekaligus menjalankan peran sebagai istri dan ibu bagi kelima putra putrinya. Kompromi dan komitmen harus dijalankan bersama dengan suami. Walaupun ada asisten rumah tangga yang membantu dalam urusan pekerjaan rumah, ia tetap melatih anak-anaknya tentang kemandirian dan tanggung jawab.

Sebagai wanita yang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, tidak mungkin semuanya dilakukan sendiri. Ia

banyak berdiskusi dengan suami, guru, maupun ustadz yang mendidik putra putrinya. Selain itu, ia mengajarkan anak tertua untuk bertanggung jawab terhadap adik-adiknya ketika dirinya dan suami tidak di rumah. Prapti juga menyadari bahwa dirinya harus menyesuaikan diri dengan karakter anak-anak zaman sekarang. Istri Aris Setyadi ini tidak menutup diri atas perkembangan zaman dan aktif mempelajari tentang ilmu *parenting* (pegasuhan anak), baik yang berasal dari buku maupun media *online*.

“Saya dan suami berkomitmen memberikan pondasi yang kuat sejak kecil dengan penanaman agama yang benar, serta bersekolah di sekolah yang mengutamakan pendidikan berkarakter. Tujuannya adalah penanaman budi pekerti dan akhlak yang baik kepada anak. Juga supaya anak semakin dekat dengan Al Qur’an, baik membaca, mempelajari, atau menghafal,” ujarnya sembari tersenyum. Beberapa putra dan putri Prapti sudah mampu menghafal sebagian Al Quran. Ada yang sudah menghafal 3 juz, 6 juz dan 12 juz Al Quran.

“Tetap ada prioritas antara pekerjaan dan keluarga. Dua hal tersebut tetap berjalan beriringan namun jika salah satu membutuhkan perhatian tetap harus diutamakan. Tidak boleh hanya fokus pada satu hal saja,” ujar Prapti yang terinspirasi sahabat wanita pada masa Rasulullah bernama Asma’ Binti Abu Bakar.

Yani Oktaviani



Foto
Ilustrasi
Dandi
Sahman

Setiap diri berharap dapat menyapa mentari dengan senyuman. Akan tetapi, pagi itu terasa berbeda bagi sosok perempuan yang bekerja di kawasan segitiga emas Jakarta itu. Untaian senyum secepat kilat berubah menjadi guratan kesedihan, manakala ia mendapati kabar duka terkait wafatnya salah satu rekan kerja akibat stroke.

Bercermin dari kisah ini, sudah sepatutnya kita memproteksi diri dari berbagai ancaman penyakit melalui kultur hidup sehat. Perubahan gaya hidup, pola makan, serta kurangnya aktivitas fisik ditengarai menjadi pemicu utama. Bila kita cermati, tiga puluh tahun belakangan telah terjadi perubahan pola penyakit yang terkait dengan perilaku manusia.

Tren penyebab kematian telah bergeser, dari semula disebabkan oleh penyakit menular menjadi disebabkan oleh penyakit tidak menular. Serangan jantung, stroke, ginjal, diabetes, dan kanker diketahui menempati top five penyakit tidak menular tertinggi. Lalu menjelma menjadi momok menakutkan yang siap merenggut nyawa.

Gedung tinggi tanpa jendela serta keberadaan AC dan lift di perkantoran, selain dianggap memudahkan, tidak jarang membuat kebanyakan dari kita

malas bergerak. Hal ini didukung pula oleh pola makan serba instan, serta gaya hidup sedentari yang diyakini menjadi biang keladi meningkatnya jumlah penyakit yang berujung kematian.

Wafat di usia relatif muda karena stroke tentu ada pemicunya. Salah satunya akibat minim pengetahuan terkait gaya hidup sehat. Untuk itu, adalah hal penting bagi kita untuk mengubah gaya hidup dan pola makan menjadi lebih sehat.

Memperbanyak aktivitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur, serta melakukan *medical check up* secara rutin merupakan hal yang patut diupayakan. Sebagai tambahan, bagi pegawai yang duduk di belakang meja, melakukan senam peregangan tiap 2-4 jam sekali adalah hal yang baik untuk dilakukan. Selain itu, penyediaan *snack* rapat yang sehat, seperti buah segar, serta menghidupkan jam krida (olahraga) pada Jumat tidak ada salahnya untuk dicoba.

Sebab, kesehatan warga negara merupakan hal penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan Winston Churchill. “Healthy citizens are the greatest asset any country can have.”

Maka, menjadi sehat dan menjaga kesehatan adalah sebuah keharusan. Menjaga kesehatan tak ubahnya seperti mencintai jiwa dan raga kita. Terlebih, jiwa dan raga yang kebersamai kita bukanlah milik kita seutuhnya. Keduanya adalah titipan dari Sang Pemilik yang bisa diambil kembali sewaktu-waktu, tanpa bisa dinegosiasi.

Untuk itu, sudah sepatutnya kita mencintai jiwa dan raga kita tanpa kompromi. Sehingga saat waktu pulang telah tiba, kita dapat mengembalikannya kepada Sang Pemilik dalam keadaan baik, tanpa kurang suatu apapun.

Jadi, sudahkah kita?

Teks Farida Rosadi

Mencintai Tanpa Kompromi

Kisah Persahabatan Kareem dan Sang Pelatih

Buku ini merupakan salah satu dari buku-buku terbaik 2017 pilihan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Seperti diketahui, Barack Obama setiap tahun mempublikasikan buku-buku dan lagu-lagu yang dinilainya bagus untuk dibagikan ke masyarakat. Untuk tahun 2017, beberapa buku terbaik tersebut adalah: *The Power* by Naomi Alderman, *Grant* by Ron Chernow, *Evicted: Poverty and Profit in the American City* by Matthew Desmond, serta buku yang akan menjadi ulasan kali ini yaitu *Coach Wooden and Me* by Kareem Abdul-Jabbar. Sesuai judulnya, Kareem Abdul Jabbar menguraikan hubungannya yang

luar biasa dengan mantan pelatihnya sejak kuliah di University of California at Los Angeles (UCLA) hingga menjadi pemain profesional NBA.

Pada bagian prolog, Kareem menjelaskan alasan harus menunggu 50 tahun untuk menulis buku tentang Coach John Wooden. Ia juga menjelaskan kegembiraan dan apresiasinya kepada Presiden Barack Obama yang memberikan gelar kehormatan Presidential Medal of Freedom pada November 2016 (kala itu Obama masih menjabat sebagai Presiden AS). Bagi Kareem, penghargaan itu bukanlah semata-mata karena karier di dunia basketnya yang menjulang tinggi, namun karena selama 17 tahun ia menulis buku dan artikel tentang ketidakadilan sosial yang terjadi.

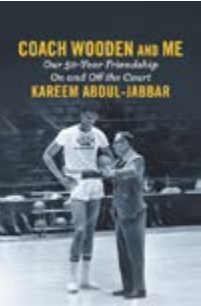
Saat menerima penghargaan tersebut, Kareem teringat pada John Wooden, sosok yang menginspirasi selama ini. John Wooden juga pernah menerima penghargaan Presidential Medal of Freedom dari Presiden George W. Bush pada Juli 2003. Bagi Kareem, Wooden bukan hanya sekedar *coach* (pelatih) yang dihormatinya selama di UCLA. Kareem dan Wooden telah bersahabat selama hampir empat dekade.

Bahkan pengaruh Wooden selalu ada dalam tiap jenjang kehidupan Kareem saat memiliki anak, pensiun, hingga berganti karier.

Kareem pun selalu teringat pesan-pesan Wooden yang ia abadikan dalam bab awal buku ini. Berikut beberapa petikannya. “Pemain yang sudah bermain dengan sungguh-sungguh tidak pernah kalah, mereka hanya kekurangan waktu saja.” Tugas utama *coach* seharusnya bukan untuk membuat menjadi pemain yang lebih baik, tapi untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik.”

Jalanan persahabatan Kareem dengan Wooden ini sungguh indah. Kareem bersyukur memiliki sahabat seperti Wooden yang selalu mengingatkannya. Begitu juga dengan Wooden yang berteman dengan Kareem hingga akhir hayat Wooden di usia 99 tahun. “*The nice thing about having Coach as a lifelong friend is that whenever I wavered, he was there to remind me,*” ujar Kareem dalam bukunya.

Peresensi Anies Said Basalamah, Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM



Judul: Coach Wooden and Me: Our 50-Year Friendship On and Off the Court
Pengarang: Kareem Abdul-Jabbar
Penerbit: Grand Central Publishing
Tahun Terbit: 2017
Deskripsi Fisik: 307 + v halaman
ISBN: 978-1-4555-4227-7

Surga Dunia di Nusa Penida

Pulau Bali yang juga dikenal dengan sebutan pulau dewata merupakan destinasi wisata yang sudah lama tersohor hingga ke mancanegara. Daya tarik pulau ini seakan tidak ada habisnya. Setiap sudutnya menawarkan keindahan yang berbeda-beda. Belum puas rasanya jika hanya seminggu berlibur di sini.

Kami berdelapan tiba bandara internasional Ngurah Rai, Bali saat subuh menjelang. Tepat pukul 05.30 pagi, kami langsung menuju ke Pelabuhan Sanur untuk menikmati matahari terbit. Selain itu, kami juga mencari kapal cepat menuju Nusa Penida, sebuah kepulauan kecil di tenggara Bali. Harga tiket menuju ke sana sebesar Rp75.000. Kapal berangkat pukul 7.30 dengan waktu tempuh 45 menit.

Waktu menunjukkan pukul 09.00 saat kami tiba di Pelabuhan Nusa Penida. Kami kemudian memutuskan untuk menyewa mobil untuk menjelajahi berbagai tempat. Biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan jasa pemandu wisata sehingga pengunjung tidak perlu takut tersesat.

Pemandu kami kemudian menjelaskan bahwa Nusa Penida terbagi menjadi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat, timur, dan selatan. Paket sewa mobil kami hanya mencakup Nusa Penida bagian barat dan timur. Kami memilih untuk ke Nusa Penida bagian barat terlebih dahulu karena ingin mengejar matahari terbenam.

Suasana di daerah tersebut sungguh tentram, damai, dan bebas polusi. Masyarakat setempat pun sangat ramah. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah Kelingking Beach. Untuk menuju ke sana membutuhkan waktu hampir 2 jam berkendara. Beberapa jalan cukup mulus, namun sempit untuk dilalui dua mobil.

“Masya Allah”, itu kata pertama yang kami ucapkan saat melihat keindahan pantai tersebut. Warna pantai bergradasi hijau toska, biru muda, dan biru tua dihiasi oleh lembutnya pasir putih. Perbukitan di sekitar pantai sangat unik menyerupai dinosaurus. Banyak orang menyebutnya “T-Rex on Nusa Penida”. Rasanya sangat ingin berenang disana. Namun karena

keterbatasan waktu, kami kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.

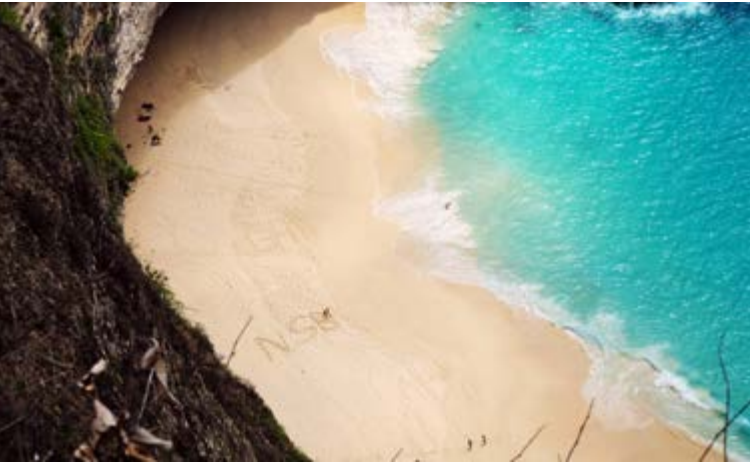
Tujuan kami berikutnya adalah Pantai Pasir Uug atau sering disebut Broken Beach. Pantai ini sering kali masuk ke berbagai majalah *traveling*. Tidak mengherankan sebab pemandangannya memang begitu elok. Lautan membentang luas dengan ombak keras menghantam tebing. Unikny terdapat lubang besar di tengah tebing tinggi sehingga disebut *broken beach*.

Tidak jauh dari *broken beach* terdapat kolam alami di bibir laut bernama Angels Billabong. Kita bisa berenang di sana. Air jernih berpadu dengan batu karang yang berlubang-lubang terasa sangat memanjakan mata. Konon, billabong berasal dari istilah Australia yang berarti ujung dari aliran-aliran sungai yang buntu.

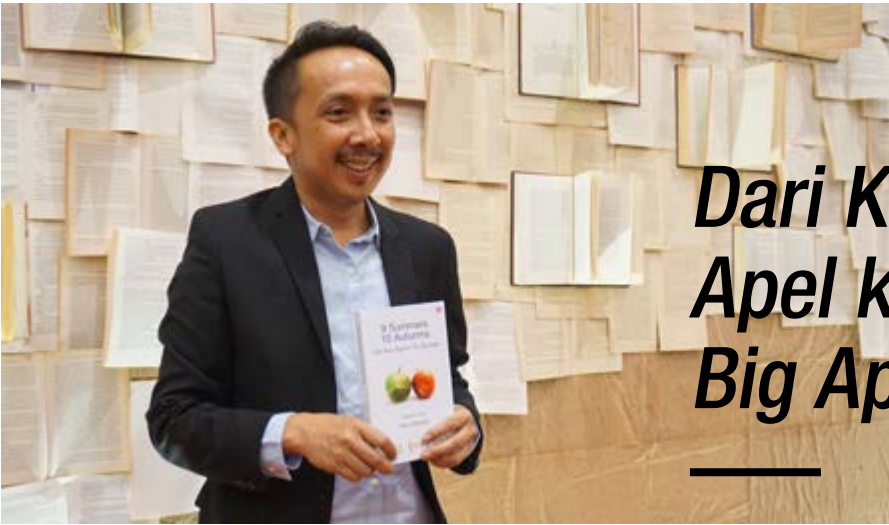
Jadi, Angels Billabong ini sebenarnya merupakan sungai yang memiliki banyak cabang. Saat bermuara ke laut salah satu cabangnya membentuk cerukan menyerupai kolam. Saking indahnya, kolam tersebut kemudian diibaratkan sebagai tempat pemandian para bidadari surga sehingga dinamakan Angels Billabong. Jauh sebelum nama Angels Billabong digunakan untuk menarik wisata, penduduk asli Nusa Penida sebenarnya menyebut objek ini dengan nama Umahtran.

Mengingat tujuan utama kami adalah menikmati matahari terbenam, kami kemudian segera menuju ke Chystal Bay, sebuah pantai berpasir putih dan berombak tenang. Pukul 18.00 matahari turun tepat ditengah-tengah pantai. Hampir semua wisatawan mengabadikan momen indah tersebut melalui kamera masing-masing.

Teks dan foto Akhsan Akbar



Kelingking Beach dan Broken Beach.



Dari Kota Apel ke The Big Apple

Bagi diri Iwan Setyawan atau biasa dipanggil Iwan, buku tentang *how to read a good books* memang tersedia sangat banyak di toko. Namun buku-buku tersebut tidak akan ada nilai gunanya apabila diri kita sendiri tidak pernah membaca buku. Pasca lulus dari Sarjana Statistik IPB, Iwan sempat bekerja di Nielsen dan Danareksa Research Institute sebelum berpindah merambah karier ke New York, Amerika Serikat. Di sini ia mulai berkenalan dengan banyak buku inspiratif yang mulanya diperkenalkan oleh temannya. Buku-buku *best seller* internasional, seperti karangan Dostoyevsky, Orhan Pamuk, sampai buku karangan lokal Pramoedya Ananta Toer, habis dilahapnya.

Untuk menjadi penulis yang baik, ia memberikan tips agar selalu memberikan determinasi dan tidak pantang menyerah untuk menulis buku. Misalnya saja ketika ia mulai ingin menulis buku pertamanya. Sebelumnya, ia tidak mempunyai pengalaman ataupun kemampuan di bidang penulisan. Namun, karena ia mempunyai keinginan kuat untuk mengajarkan nilai dan sejarah perjuangan hidupnya kepada keponakan dan keluarganya, ia pun sempat menghabiskan masa enam bulan. Akhirnya, ia berhasil merampungkan buku tentang hidup dan keluarganya, *9 Summer 10 Autumn*, yang banyak menginspirasi orang lain.

Ia memperoleh inspirasi menulis dari hobi membacanya. Menurutny, buku yang bagus adalah buku yang meledak di mata pembacanya. Mampu memberikan memori yang membekas kepada pembaca bahkan setelah membacanya. Pertama kali buku yang ia tulis adalah *Melankoli Kota Batu* yang merupakan kumpulan fotografi dan narasi puitis. Buku tersebut terinspirasi dari buku *Istanbul* karangan Orhan Pamuk dan ia mendedikasikan buku tersebut untuk kota kelahirannya, Batu di Malang.

“Saya baca buku tentang Istanbul. *It’s so beautiful*. Saya pengen nulis tentang itu. Saya nulis nulis aja, story perjalanan, mesin waktu di buka dari akhir dan awalnya justru di bagian

akhir. Intinya nulis buku membebaskan kita dari penderitaan kita,” jelasnya.

Untuk buku fenomenal keduanya, *9 Summer 10 Autumn*, ia menjadikan perjalanan hidupnya sebagai sumber cerita. Tentu saja agar bisa menjadi inspirasi tidak hanya bagi keponakannya saja, namun juga bagi setiap orang yang membacanya. Terbukti pada suatu malam ia pernah mendapatkan email dari seorang penggemar bukunya. Sang penggemar menceritakan bagaimana kisah hidupnya mirip dengan cerita Iwan. Bahkan, pembaca bukunya tersebut terinspirasi juga untuk terus melanjutkan pendidikan di New York.

“Saya enggak peduli buku laku berapa buah. Tapi yang terpenting berapa hati yang tersentuh kayak si Mahdi. Dan si Mahdi ini bilang ke saya, ‘Pak Iwan, saya janji akan foto buku Pak Iwan didepan patung Liberty’. Tepat dua hari sebelum film saya *launching*, si Mahdi nge-tweet, ‘Pak Iwan, as promised, ini buku Pak Iwan didepan patung Liberty’. Saya bilang ternyata ada satu lagi anak supir angkot yang hidupnya seperti saya akhirnya bisa mengejar cita-citanya,” ujar Iwan mengisahkan cerita dari penggemar bukunya.

Teks Abdul Aziz

Iwan Setyawan membawa novel *9 Summer 10 Autumn*, yang banyak menginspirasi orang lain.

Foto dok. Biro KLI.

Mas Praim



Cerita: Dimach | Gambar: Bimo Adi



MEMPERINGATI TAHUN BARU IMLEK 2569 KONGZILI

16 FEBRUARI 2018



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**